

SKRIPSI

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
MASYARAKAT DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

**YULI AFRIZAL
NIM. 170604082**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuli Afrizal
NIM : 170604082
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Yuli Afrizal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Aceh

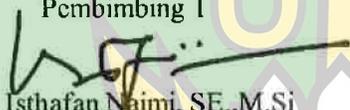
Disusun Oleh


Yuli Afrizal
NIM: 170604082

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Pembimbing II


TajulUla, SE., M.Si
NIP. 199312082020121015

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

AR-RANIRY

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Aceh

Yuli Afrizal
NIM. 170604082

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Mai 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



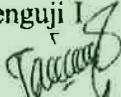
Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Sekretaris



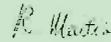
TajulUla, SE., M.Si
NIP.199312082020121015

Penguji I



Jariah Abu Bakar, S.E., M.Si.
NIP. 197508282005012001

Penguji II



Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui, Y

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Agr
NIP. 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yuli Afrizal
NIM : 170604082
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : apri0108@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Kku Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Masyarakat Di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikaskannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Mei 2022

Mengetahui,

Penulis

Yuli Afrizal
NIM.170604096

Pembimbing I

Dr. Istifan Nidmi, SE., M.Si
NIP: 197404172005012002

Pembimbing II

Tajul Ula, SE., M.Si
NIP: 197907132014112002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Analisis Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh dan Marwiyati. SE., MM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

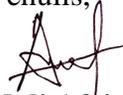
3. Muhammad Arifin, PH. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si Sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Tajul Ula, SE., M.Si. sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Jariah Abu Bakar SE.,M.Si Sebagai Dosen Penguji 1 dan Rachmi Meutia, M.Sc Sebagai Dosen Penguji 2.
6. Marwiyati. SE., MM. Sebagai Pembimbing Akademik (PA) terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta dan Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Terima kasih juga kepada kerabat saya Reza Maulana, Rifki Nanda, Mulia Ulfa, dan Sahabat lainnya atas bantuan dan motivasi dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2021

Penulis,



Yuli Afrizal
170604082



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

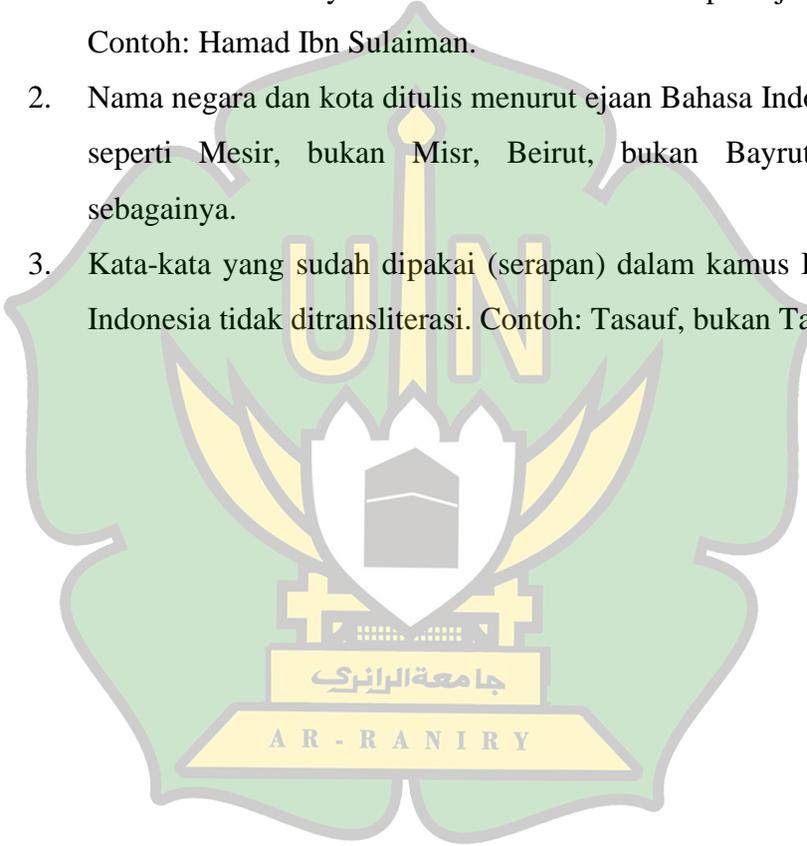
Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : YULI AFRIZAL
NIM : 170604082
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Masyarakat Di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
Pembimbing II : Tajul Ula, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020. Populasi dalam penelitian ini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang meliputi populasi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan cross cation tahun 2017 sampai tahun 2020 di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan bantuan software Eviews. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020. Dengan di peroleh F hitung sebesar 17.144 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji signifikansi menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,096 > 0,05$. Pengangguran berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2017-2020, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, dan Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2017-2020 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

**Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,
Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

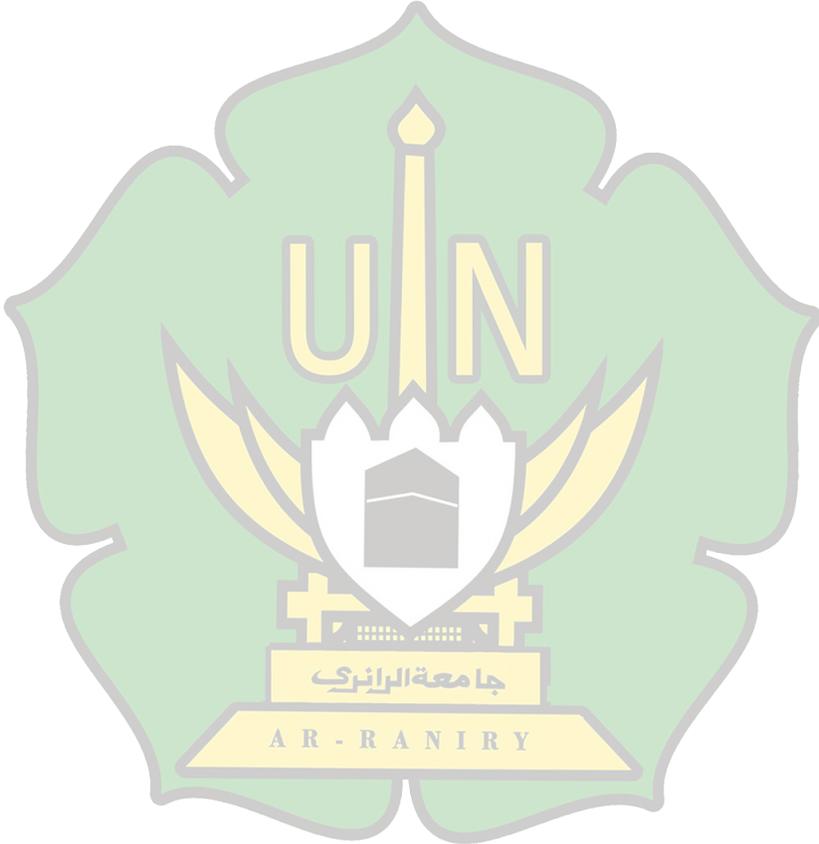
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SIDANG	iv
PENGESAHAN SIDANG.....	v
FORM PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	17
2.1.1 Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	17
2.1.2 Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan.....	27
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan	30
2.1.4 Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam	32
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	35
2.2.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	36
2.3 Pengangguran	37
2.3.1 Konsep dan Cara Pengukuran Tingkat Pengangguran.....	37
2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran	38
2.3.3 Dampak pengangguran terhadap perekonomian.....	39
2.4 Kemiskinan.....	41
2.4.1 Konsep Kemiskinan	41

2.4.2	Ukuran Kemiskinan	42
2.4.3	Faktor faktor penyebab kemiskinan	44
2.5	Konsep Kesejahteraan	48
2.5.1	Pengertian Kesejahteraan	48
2.5.2	Indikator Kesejahteraan	50
2.6	Pendapatan Masyarakat	51
2.6.1	Pengertian Pendapatan Masyarakat	51
2.6.2	Populasi Masyarakat (Penduduk).....	53
2.7	Temuan Penelitian Terkait	54
2.7.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	54
2.7.2	Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan	55
2.7.3	Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan	56
2.8	Kerangka Berpikir	62
2.9	Pengembangan Hipotesis	63
BAB III METODE PENELITIAN		65
3.1	Jenis Penelitian	65
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian	65
3.3	Populasi dan Sampel	66
3.4	Variabel Penelitian	66
3.4.1	Klarifikasi Variabel	66
3.4.2	Definisi Operasional	67
3.5	Uji Asumsi Klasik	67
3.6	Model Estimasi	69
3.6.1	Penentuan Model Estimasi	69
3.6.2	Tahapan Pengujian Model	72
3.7	Pengujian Hipotesis	73
3.7.1	Uji Secara Parsial (Uji t)	73
3.7.2	Uji Secara Simultan (Uji F)	74
3.7.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		76
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
4.1.1	Kabupaten Simeulue	76
4.1.2	Kabupaten Aceh Singkil	77

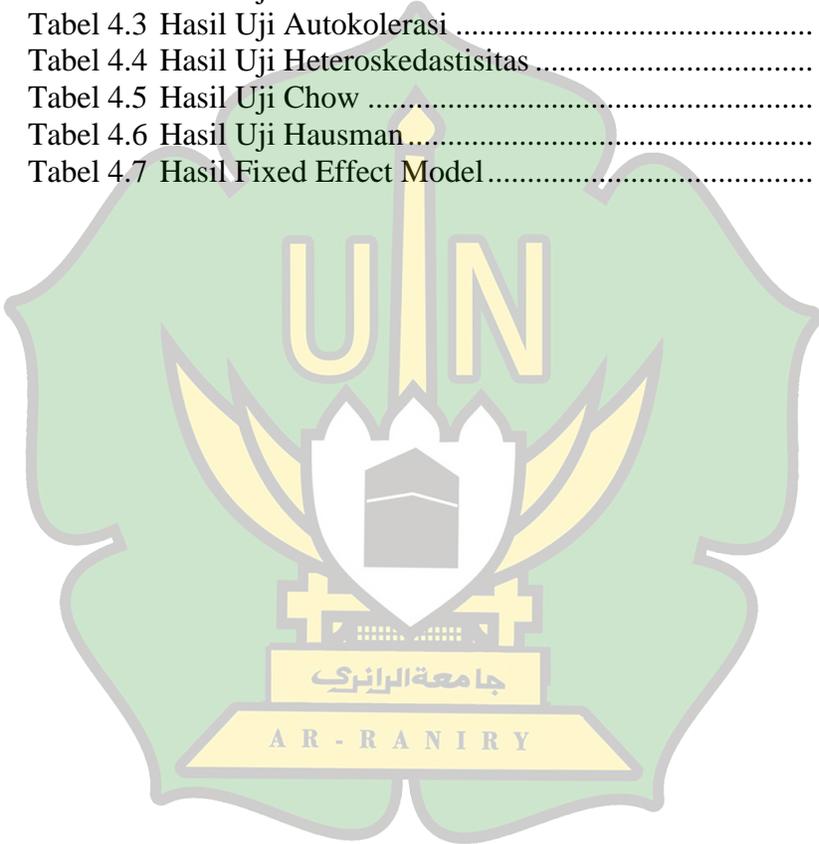
4.1.3 Kabupaten Aceh Selatan	78
4.1.4 Kabupaten Aceh Tenggara.....	79
4.1.5 Kabupaten Aceh Timur.....	81
4.1.6 Kabupaten Aceh Tengah.....	82
4.1.7 Kabupaten Aceh Barat	83
4.1.8 Kabupaten Pidie	84
4.1.9 Kabupaten Bireun	85
4.1.10 Kabupaten Aceh Utara.....	86
4.1.11 Kabupaten Aceh Barat Daya	87
4.1.12 Kabupaten Gayo Lues.....	89
4.1.13 Kabupaten Aceh Tamiang	90
4.1.14 Kabupaten Nagan Raya	91
4.1.15 Kabupaten Aceh Jaya	92
4.1.16 Kabupaten Bener Meriah.....	93
4.1.17 Kabupaten Pidie Jaya.....	95
4.1.18 Kabupaten Aceh Besar	96
4.1.19 Kota Banda Aceh.....	97
4.1.20 Kota Sabang.....	98
4.1.21 Kota Langsa.....	99
4.1.22 Kota Lhokseumawe	100
4.1.23 Kota Subulussalam	101
4.2 Analisis Deskriptif.....	103
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	104
4.3.1 Uji Normalitas	104
4.3.2 Uji Multikolinieritas	105
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	106
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	106
4.4 Estimasi Regresi Data Panel.....	107
4.4.1 Hasil Uji Chow	107
4.4.2 Uji Hausmann	108
4.5 Hasil Uji Goodness of Fit.....	109
4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	110
4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	111
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia	30
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi	67
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif (N=69)	103
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	105
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokolerasi	106
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	106
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	107
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman.....	108
Tabel 4.7 Hasil Fixed Effect Model.....	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kurva Kuznet	26
Gambar 2.2.	Kurva Lorenz	28
Gambar 2.3.	Kerangka Berpikir.....	63
Gambar 4.1.	Grafik Penelitian Kabupaten Simeulue.....	76
Gambar 4.2.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Singkil.....	77
Gambar 4.3.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Selatan.....	78
Gambar 4.4.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Tenggara ...	80
Gambar 4.5.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Timur	81
Gambar 4.6.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Tengah	82
Gambar 4.7.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Barat.....	83
Gambar 4.8.	Grafik Penelitian Kabupaten Pidie.....	84
Gambar 4.9.	Grafik Penelitian Kabupaten Bireun.....	85
Gambar 4.10.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Utara	87
Gambar 4.11.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Barat Daya	88
Gambar 4.12.	Grafik Penelitian Kabupaten Gayo Lues	89
Gambar 4.13.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Tamiang	90
Gambar 4.14.	Grafik Penelitian Kabupaten Nagan Raya	91
Gambar 4.15.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Jaya	93
Gambar 4.16.	Grafik Penelitian Kabupaten Bener Meriah.....	94
Gambar 4.17.	Grafik Penelitian Kabupaten Pidie Jaya	95
Gambar 4.18.	Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Besar	96
Gambar 4.19.	Grafik Penelitian Kabupaten Banda Aceh	97
Gambar 4.20.	Grafik Penelitian Kota Sabang.....	98
Gambar 4.21.	Grafik Penelitian Kota Langsa	99
Gambar 4.22.	Grafik Penelitian Kota Lhokseumawe	101
Gambar 4.23.	Grafik Penelitian Kota Subulussalam	102
Gambar 4.24.	Uji Normalitas.....	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2015-2020	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Aceh	4
Grafik 1.3 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Aceh.....	6
Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Masyarakat Provinsi aceh ..	10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu dari sejumlah negara berkembang di Asia yang stabilitas ekonominya belum tercapai. Hal ini bisa dilihat melalui tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Jika bagian yang sama dari hasil produksi ekonomi didapatkan tiap orang maka pendapatan didistribusikan dengan merata. Menurut Dewi (dikutip dalam Istikharoh 2019) ketimpangan pendapatan adalah perbandingan pendapatan yang cenderung sederhana diantara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang pendapatannya rendah. Masalah ketimpangan pendapatan ini terjadi pada seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Pemerataan pendapatan dalam seluruh golongan masyarakat bisa menikmati hasil produksi nasional, sehingga masyarakat menjadi semakin sejahtera dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraan masyarakat bisa dikaitkan dengan satu dari beberapa faktor penting yakni rendahnya ketimpangan pendapatan, namun faktor tersebut seringkali tidak diperhitungkan di dalam melakukan perbandingan antara tingkat kesejahteraan masyarakat serta transisinya seiring perubahan waktu. Secara umum yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat ialah pendapatan perkapita serta pendapatan nasional (Arsyad, dikutip dalam Hidayat 2019).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan menjadi peningkatan standar material kehidupan bermasyarakat terutama melalui besar yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan total jasa serta barang yang diproduksi, secara langsung diikuti oleh peningkatan total penduduk serta perbaikan dan pengembangan teknologi, yang menyebabkan perubahan pendapatan di masyarakat atau suatu kawasan (BPS Aceh, 2020).

Pertumbuhan ekonomi di Aceh meningkat dari tahun ke tahun khususnya bidang non migas. Sementara migas, pertumbuhan ekonomi tidak stabil di tahun 2015, serta kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2019, Rerata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dengan migas sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir dengan persentase 4,06 % per tahun, dan rerata pertumbuhan tanpa migas sejumlah 4,27 % per tahun. Tahun 2019, perekonomian di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sejumlah 4,15 %, sementara non migas juga mengalami peningkatan sejumlah 4,20 %. Untuk lebih detail pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bisa dilihat melalui Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2015-2020



Sumber: BPS Aceh (2020)

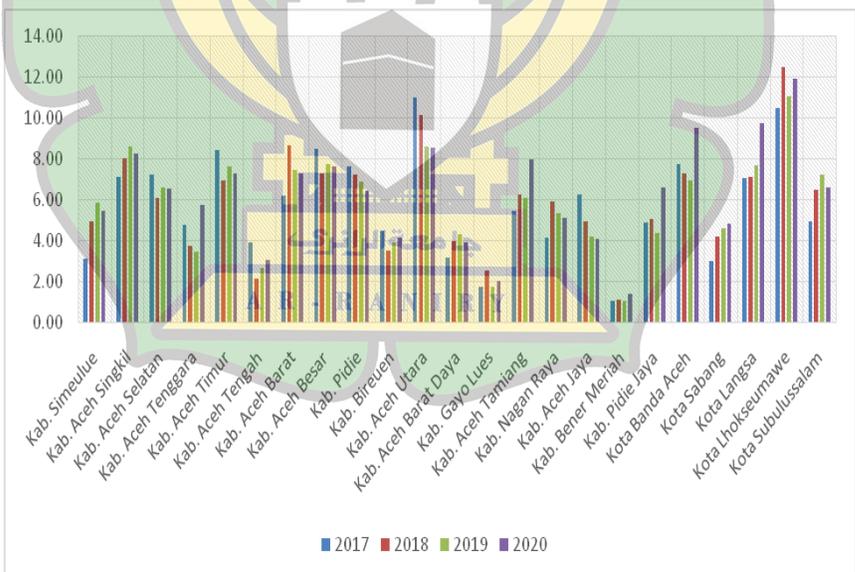
Berdasarkan Grafik 1.1 pertumbuhan ekonomi di Aceh meningkat setiap tahunnya baik migas maupun non migas. Dimana dalam tahun 2015 migas berada di angka 4,28 % dan non migas diangka -0,73 %, pada tahun 2016 migas sedikit mengalami penurunan diangka 3,24 % dan non migas mangalami peningkatan di angka 4,26 %, pada tahun 2017 migas mengalami peningkatan diangka 4,18 % dan non migas diangka 4,13 %, tahun 2018 migas berapa pada angka 4,61 % dan non migas berada pada angka 4,49 %. Pada tahun 2019 migas pertumbuhan migas berada pada angka 4,14 % dan non migas berada pada angka 4,19 %, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami penurunan yang drastik. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang melanda seluruh Indonesia dan perekonomian mengalami penurunan sebesar 0,37 % dan non migas terjadi penurunan sebesar 0,74%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang merata memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pengangguran merupakan individu ataupun sosok yang tak bekerja ataupun tengah mencari pekerjaan. Pengangguran adalah realitas yang negara berkembang serta negara maju hadapi. Secara general, pengangguran diartikan sebagai situasi di mana mereka yang termasuk dalam kategori angkatan tidak memiliki pekerjaan. Tingginya tingkat kepedulian di suatu daerah akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu daerah.

Pengangguran tidak hanya menjadi beban masyarakat akan tetapi menjadi beban bagi pemerintah, yang berdampak bagi

keluarga dan lingkungan. Tingginya tingkat pengangguran juga meningkat permasalahan di suatu kawasan, meningkatkan keresahan sosial, dan meningkatkan penurunan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Jika diperhatikan lebih lanjut, dari segi ekonomi, hal utama yang menyebabkan banyaknya pengangguran adalah produk dari pasar yang gagal didalam menyediakan kesempatan kerja yang selaras pada keperluan angkatan kerja, atau bisa disebut total lapangan pekerjaan yang tersedia tidak melebihi total masyarakat yang ada. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik 1.2 berikut ini

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Masyarakat Provinsi Aceh



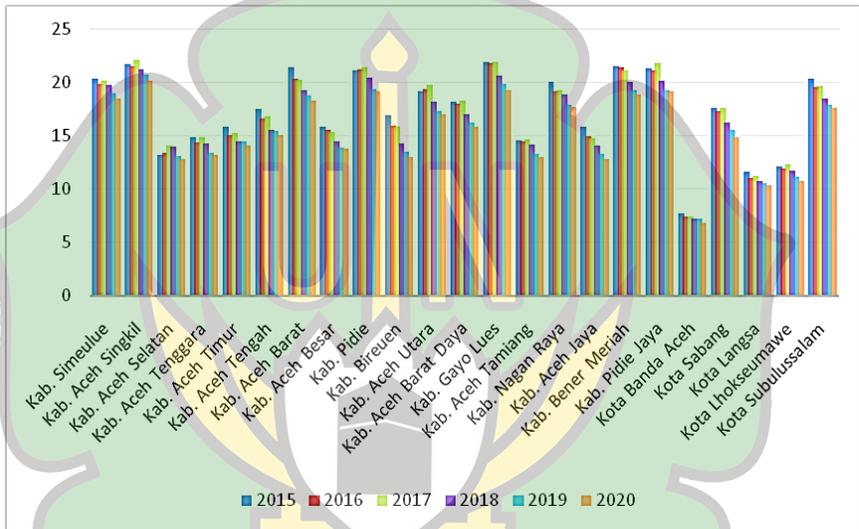
Sumber: BPS Aceh (2020)

Berdasarkan grafik 1.2 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Lhoksuemawe, tingkat pengangguran yang amat tinggi dari pada kota lainnya, yang mana di tahun 2017 hingga 10,51% tahun 2018 hingga 12,52%, tahun 2019 hingga 11,06% serta tahun 2020 hingga 11,96%. Sedangkan tingkat pengangguran paling rendah ada pada Kab. Bener Meriah, yang mana di tahun 2017 hingga 1,06%, tahun 2018 hingga 1,07%, tahun 2019 hingga 1,02% serta tahun 2020 hingga 1,35%. Tingkat pengangguran memiliki peran yang penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan pengangguran berdampak memberatkan pada ketimpangan pendapatan (Cysne & Turchick dikutip dalam Hindun 2019).

Kemiskinan adalah salah satu faktor permasalahan yang dialami Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama. Pemerintah Provinsi Aceh merupakan penyangga proses perbaikan kehidupan bermasyarakat pada suatu pemerintahan, dan selalu mencari solusi melalui perumusan sejumlah langkah yang kongkrit dalam membuat data kemiskinan menurun. Pemerintah telah berupaya berbagai macam cara dalam mengurangi angka kemiskinan. Upaya pemerintah Aceh didalam membuat angka kemiskinan berkurang harus memberikan perhatian bagi PDRB serta investasi dalam membuat penerimaan tenaga kerja. Hal ini berdampak terhadap penurunan pengangguran dan akan mengurangi kemiskinan disuatu wilayah. Di dalam suatu pemerintahan semakin tinggi tingkat

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau provinsi maka semakin besar tingkat kesejahteraan yang bisa penduduk atau masyarakat rasakan pada suatu pemerintahan. Untuk jelas tentang data kemiskinan bisa dilihat melalui Grafik 1.3 berikut ini

Grafik 1.3
Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Aceh



Sumber : BPS Aceh (2020)

Berdasarkan grafik 1.3 dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kabupaten Aceh Singkil memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain, dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mencapai 21,75 %, tahun 2016 mencapai 21,6 %, tahun 2017 mencapai 22, 11 %, tahun 2018 mencapai 21,25 %, tahun 2019 mencapai 20,78 % dan pada tahun 2020 mencapai 20,2 %. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kota Banda Aceh, dimana pada tahun 2015

tingkat kemiskinan mencapai 7,72 %, tahun 2016 mencapai 7,41 %, tahun 2017 mencapai 7,44 %, tahun 2018 mencapai 7,25 %, tahun 2019 mencapai 7,22 % dan pada tahun 2020 mencapai 6,9 %. Peningkatan kemiskinan berdampak memberatkan pada ketimpangan pendapatan.

Pemerintah Aceh telah melakukan upaya secara bertahap guna membuat total penduduk miskin berkurang seperti mengadakan berbagai program-program bantuan pemerintah yang dibagikan kepada rakyat dan memenuhi beragam layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti memperbaiki program perlindungan sosial yang lebih baik lagi, serta meningkatkan akses rumah tangga pada pelayanan dasar atau pelayanan pokok dalam menjalankan partisipasi masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inklusif ke arah yang lebih baik. Upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh salah satunya adalah mengadakan program investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan masyarakat, ketenagakerjaan, pengurangan dan kemiskinan. Semua permasalahan ini perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari instansi pemerintah Aceh.

Ketimpangan dalam suatu kawasan adalah salah satu dampak yang nyata dari proses pembangunan yang mengalami perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar kawasan yang berlebihan akan berdampak merugikan dan juga dapat mendominasi pengaruh yang sangat menguntungkan terhadap

pertumbuhan suatu kawasan tersebut. Adanya daerah yang maju dan daerah yang tidak maju akan menyebabkan adanya distribusi dalam pendapatan.

Menurut Putcup dalam Hidayat (2019) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ketimpangan distribusi pendapatan, dari disparitas upah sampai ke globalisasi. Dartatno & Putra (2018) menyatakan bahwa satu dari beberapa penyebab yang paling mendasar dari ketimpangan pendapatan atau pengeluaran yaitu timpangnya kesempatan, semacam pendidikan bisa memberikan pengaruh bagi timpangnya pendapatan didalam jangka waktu yang lama. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan berpengaruh terhadap ketidakmampuan bagi masyarakatnya secara meluas. Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut akan menciptakan kemakmuran bagi beberapa golongan, dan sebaliknya, distribusi pendapatan yang merata akan menimbulkan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Distribusi pendapatan adalah salah satu indikator pemerataan yang wajib dilakukan untuk menjaga terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Pemerataan akan terjadi jika kapasitas pendapatan yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu sama dengan kapasitas kelompok tersebut. Alat ukur yang dapat digunakan dalam distribusi pendapatan adalah indeks gini.

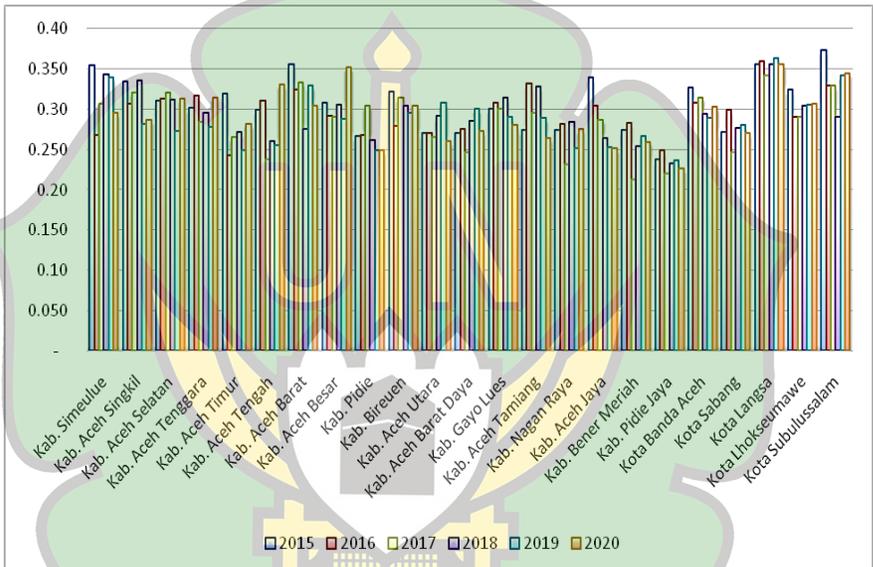
Menurut Bandyopadhyay (dikutip dalam Hindun 2019) menjelaskan bahwasanya indeks gini pada umumnya sudah dipakai menjadi ukuran ketimpangan dalam melakukan pengukuran terhadap kekinian ketimpangan. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Banerjee (dikutip dalam Hindun 2019) juga menjelaskan hal yang serupa bahwasanya indeks gini adalah pada umumnya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan serta bisa diperluas ke konteks multidimensional dari pengukuran kesejahteraan serta ketimpangan distribusi kesejahteraan diantara seseorang pada suatu kelompok masyarakat semacam pendidikan, dan kesehatan.

Alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif di antara penduduk suatu kawasan yang telah diakui secara luas adalah rasio gini. Indeks rasio Gini dengan pendapat tertentu dapat digunakan untuk analisis komparatif distribusi pendapatan relatif antara penduduk dari beberapa wilayah atau kawasan kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Syamsuddin, 2017).

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia mengelompokkan masyarakat menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi. Ketidakmerataan penyebaran pendapatan yang mengakibatkan pembangian pendapatan dalam keadaan tidak normal, sedang atau ringan dapat diukur berdasarkan

persentase pendapatan yang dimiliki oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di Provinsi Aceh bisa dilihat melalui Grafik 1.4 berikut ini

Grafik 1.4
Ketimpangan Rasio Gini Provinsi Aceh



Sumber : BPS Aceh (2020)

Berdasarkan grafik 1.4 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kota Sabang tingkat ketimpangan distribusi pendapat yang sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yang mana di tahun 2015 dengan indeks 0,271, tahun 2016 dengan indeks 0,299, tahun 2017 dengan indeks 0,247, pada tahun 2018 dengan indek 0,277, tahun 2019 dengan indeks 0,281 dan pada tahun 2020 mencapai indeks 0,271. Sedangkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan terendah terdapat di Kabupaten

Pidie Jaya, dimana pada tahun 2015 dengan indeks 0,238, tahun 2016 mencapai indeks 0,249, tahun 2017 mencapai indeks 0,220, tahun 2018 dengan indeks 0,233, pada tahun 2019 dengan indeks 0,236 dan pada tahun 2020 mencapai indeks 0,227.

Ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan oleh sebuah daerah. Dampak yang akan terjadi bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi juga dari segi sosial. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah sudah menjadi masalah tradisional yang tentu saja sangat umum untuk ditemukan. Oleh karena itu, ketimpangan bukan sesuatu yang dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sedikit demi sedikit sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar terjadi keselarasan dalam hal tersebut sehingga tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Erna, 2021).

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, antara lain faktor pertumbuhan ekonomi, faktor pengangguran dan faktor kemiskinan, ketiga faktor ini juga dapat diatasi dengan pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas yang menjadi permasalahan adalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh Kabupaten/kota diProvinsi aceh, dan meningkatnya angka kemiskinan serta meningkatnya angka pengangguran yang terus menerus dari tahun ke tahun, ketiga permasalahan tersebut

dianggap dapat mempengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh, selain itu juga ketidakpastian upah yang akan diterima oleh pekerja, serta banyak perusahaan yang merumahkan karyawan oleh beragam faktor serta harga kebutuhan pokok di pasar yang tinggi. Minimnya lapangan kerja serta penghasilan yang rendah memberikan pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh.

Penelitian Gustiara (2020) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan variabel pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pangkiro (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pendapatan, dalam artiannya pertumbuhan ekonomi naik maka ketimpangan akan tetap, serta variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan, yang artinya pengangguran naik maka ketimpangan pendapatan akan ikut naik.

Dea Fauzia (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Ahmad Khaeruzzad (2019)

meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat, menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta menjelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan variabel pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang penelitian yang berjudul **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, bisa dirumuskan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Apakah pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

3. Apakah kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang pengetahuan yang berhubungan dengan analisis pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu untuk saya sendiri dan dapat memperkaya wawasan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara Praktis

Bagi Masyarakat Provinsi Aceh hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan juga pengetahuan.

3. Secara Akademis

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum skripsi ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab Landasan Teori ini berisikan teori yang berupa ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, konsep kesejahteraan, pendapatan masyarakat, serta kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik pembahasan. Metodologi penelitian ini berisi tentang jenis penulisan, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, uji asumsi klasik, model estimasi, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, estimasi regresi data panel, hasil uji goodness of fit, hasil uji signifikansi parameter individu (Uji t), dan hasil uji koefisien determinasi (R^2) serta hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

2.1.1 Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), ketimpangan adalah sesuatu yang tidak seharusnya, betapa tidak adilnya atau salah. Sedangkan pendapatan di sisi lain, adalah pendapatan dari sektor formal dan informal yang dihitung dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Tingkat pendapatan ditetapkan oleh kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan jasa serta barang. Makin tinggi kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan jasa serta barang menyebabkan makin tinggi juga pendapatan yang dihasilkan. Satu dari sejumlah cara untuk meningkatkan distribusi pendapatan ialah melalui pelaksanaan pembangunan atau masalah distribusi pendapatan adalah tingkat hasil kerja yang diterima oleh setiap masyarakat.

Adelman dan Morris dalam Huda (2015:65), menjelaskan faktor yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada negara yang tengah berkembang, yakni:

1. Masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang tinggi menyebabkan menurunnya hasil usaha atau pencaharian per kapita.
2. Inflasi, meskipun peningkatan pendapatan uang, tidak pernah produksi barang meningkat sebanding dengannya.

3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah atau kota.
4. Investasi yang sangat banyak didalam proyek padat modal jadi modal dari tambahan harta lebih besar daripada pendapatan yang bersumber dari kerja, jadi terjadi penambahan pengangguran.
5. Rendahnya kesiapsiagaan untuk bergerak sosial.
6. Industri substitusi impor yang berdampak terhadap kenaikan harga barang hasil industri untuk memberi perlindungan bagi usaha golongan kapitalis, Kebijakan yang diberikan oleh komite perdagangan.
7. Dapat menimbulkan ketidakpastian permintaan ekspor dari negara berkembang sehingga melemahnya nilai tukar (dolar) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.
8. Rusaknya industri dalam negeri seperti industri pertukangan dan pengolahan rumah tangga

Dalam ekonomi konvensional, distribusi didefinisikan dengan klasifikasi pembayaran dalam bentuk sewa, uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, bunga, modal dan keuntungan, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti distribusi atau pendistribusian penyerahan barang

kepada beberapa individu atau suatu tempat yang dituju. distribusi merupakan proses pengiriman atau penyerahan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. distribusi adalah proses mendapatkan harga dari bidang hasil kerja dan dari bidang membayar harga (Idri, 2015:112).

Masyarakat Indonesia tidak seimbang merupakan elemen yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam melihat tinggi rendahnya keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran dalam menjaga atau memelihara serta tertib dalam masyarakat dan sebagainya, keselamatan dan keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran suatu negara. Bidang distribus pendapatan telah menarik perhatian para ekonom serta para ilmuwan, khususnya pada 20 tahun terakhir. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat Indonesia tidak seimbang perkapita sebagai pemicu kemajuan dalam bidang ekonomi untuk menjelaskan chaos yang terjadi di berbagai bangsa. Ternyata kekacauan sering muncul karena kesenjangan cara perbuatan hasil kerja yang lebar. Ketimpangan hasil kerja merupakan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi diantara berbagai kawasan didalam suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan tingkat hasil kerja perkapita antar wilayah (Desi dalam Kurniawan, 2020).

Keadaan tumbuhnya perkembangan atau kemajuan dalam ekonomi yang tinggi dengan keinginan yang dapat dicapai dalam penerapannya adalah penyebab terjadinya perekonomian. Frekuensi

yang memiliki dua modus nilai dalam nilai masyarakat Indonesia yang tidak seimbang sehingga diharapkan dapat membuat pendidikan serta kesehatan juga mengurangi pengurangan dampak dari ekonomi itu sendiri upaya pembangunan ekonomi, hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang efisien serta efektif sehingga menciptakan pemerataan ekonomi, sebab diharapkan dapat membuat pendidikan serta kesehatan juga mengurangi pengurangan dampak dari ekonomi itu sendiri.

Menurut Todaro dalam Permana (2016) menyatakan bahwa pola distribusi pendapatan tidak merata dimana semakin tinggi laju kemajuan dalam bidang ekonomi dikarenakan orang yang berhasil kerja maka semakin tinggi juga rasio tabungan sehingga akan meningkatkan tingkat tabungan agregat yang diikuti dengan meningkatnya investasi serta kemajuan dalam bidang ekonomi. Apabila tingkat pertumbuhan PDRB adalah satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi yang paling baik ialah pembuatan pola cara perbuatan hasil kerja menjadi tidak merata atau tidak berkesenambungan.

Distribusi pendapatan pada dasarnya sebuah konsep yang membahas mengenai distribusi pendapatan bagi tiap masyarakat ataupun rumah tangga pada masyarakat. Ada 2 konsep utama tentang pengukuran distribusi pendapatan diantaranya sejumlah konsep seperti yang mutlak dan konsep-konsep yang terkait. Konsep absolut adalah konsep penilaian yang menggunakan parameter dengan sesuatu yang mutlak. Konsep pemikiran tentang

distribusi pendapatan yang melakukan perbandingan jumlah pendapatan yang individu ataupun kelompok individu terima dengan jumlah pendapatan yang masyarakat terima secara menyeluruh disebut relatif (Sukirno, 2016).

Distribusi pendapatan adalah salah satu bidang dalam masalah pengangganan Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang perlu diperhatikan serius dari pemerintah, dikarenakan pada dasarnya cara perbuatan hasil kerja merupakan ukuran Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan bisa berubah-ubah. Ada dua kelompok tingkat Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yaitu Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang tidak terbatas dan Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan bisa berubah-ubah. Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang tidak terbatas merupakan suasana atau keadaan dimana tingkat hasil kerja yang diterima oleh individu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan bisa berubah-ubah adalah perhitungan Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan berdasarkan cara perbandingan hasil kerja daerah atau pendapatan kota (Sukirno, 2016: 61).

Distribusi Pendapatan adalah satu dari sejumlah bidang permasalahan yang butuh diberi perhatian sebab hakikatnya cara perbuatan hasil kerja merupakan ukuran yang bisa berubah-ubah.

Ada dua kelompok gerak, yaitu gerak yang tidak terbatas dan gerak bisa berubah-ubah. Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang tidak terbatas adalah suatu keadaan dimana tingkat hasil kerja yang diterima individu tidak mencukupkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan bisa berubah-ubah adalah perhitungan berdasarkan cara perbandingan buatan distribusi pendapatan daerah (Sukirno, 2016:61).

Ada dua model ketimpangan, yakni teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori itu memberi peran khusus bagi peran modal yang bisa diwali aktivitas investasi yang tertanam di sebuah daerah guna menarik modal ke daerah tersebut. Hal ini pastinya bisa memberikan pengaruh bagi kemampuan masing-masing daerah didalam berkembang dan juga menimbulkan pertidaksamaan kemampuan didalam menghasilkan pendapatan (Sukirno, 2016:61).

Investasi dipandang lebih menguntungkan apabila dialokasi kepada daerah yang bisa menghasilkan return besar dalam jangka waktu yang cenderung maju akan tumbuh lebih cepat sedangkan kawasan yang kurang berkembang akan memiliki tingkat pertumbuhan yang cenderung lambat. Hal inilah yang mengakibatkan timpangnya pendapatan antardaerah, jadi dibutuhkan sebuah perencanaan serta kebijakan didalam mengarahkan alokasi investasi ke arah kemajuan ekonomi yang

semakin berimbang pada semua kawasan di tanah air (Sjafrizal, 2017:76).

Distribusi pendapatan ialah salah satu bidang yang butuh diberi perhatian sebab dasarnya distribusi pendapatan ialah ukuran pergerakan bisa berubah-ubah. Ada dua kelompok gerakan, yaitu gerakan bisa berubah-ubah dan gerakan yang tidak terbatas. Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang tidak terbatas ialah sebuah keadaan yang mana individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar semacam pendidikan, kesehatan, sandang, pangan serta papan atau dengan kata lain hasil kerja tidak bisa membiayai biaya hidup dengan cukup. Sementara bisa berubah-ubah ialah perhitungan sesuai dengan hasil kerja pada sebuah kawasan (Sukirno, 2016:54).

Ada dua macam ukuran pokok cara perbuatan hasil kerja yang dibedakan oleh para ekonom, baik untuk tujuan analitis maupun pengumpulan data kuantitatif (Todaro, 2016), yaitu:

1. Distribusi Ukuran

Distribusi pendapatan individu ataupun distribusi ukuran pendapatan yang sering dipakai oleh ekonom. Distribusi ini hanya berkaitan dengan individu ataupun rumah tangga juga jumlah pendapatan yang masyarakat terima. Cara pendapatan tersebut didapatkan tidak dipermasalahkan dan tidak dipermasalahkan juga banyaknya yang didapatkan tiap individu, adahal hasil pekerjaan masyarakat ataupun sejumlah sumber lainnya semacam laba usaha, penarikan bunga, hadiah, sewa, warisan serta lainnya. Selanjutnya

dihiraukan pula sejumlah sumber pendapatan yang bersangkutan pada tempat serta jenis pekerjaan.

Maka dari itu, para ahli ekonomi dan statistik lebih senang mengombinasikan seluruh orang melalui pengambilan skala pendapatan per individu selanjutnya membagi jumlah masyarakat kedalam kelompok yang memiliki perbedaan sesuai dengan “ukuran” ataupun besaran hasil pendapatan yang mereka dapatkan. Sebuah metode yang sering dipakai membagi penduduk secara menyeluruh kedalam 5-10 kelompok sesuai dengan skala tingkat pendapatan masyarakat serta selanjutnya menetapkan berapakah proporsi yang diterima tiap kelompok pendapatan tersebut dari jumlah pendapatan nasional.

2. Distribusi fungsional

Pendapatan kedua ukuran distribusi yaitu distribusi pendapatan fungsional per faktor dasar atau produksi. Beda halnya dengan distribusi ukuran yang menjelaskan tentang lingkup manusia, persentase penghasilan distribusi fungsional yang mempersoalkan semua dari pekerja, dan membandingkan dengan hasil persentase total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya ukuran distribusi pendapatan tersebut menitikberatkan terhadap bagian dari pendapatan nasional jumlah yang diterima setiap faktor produksi.

Cara perbuatan suatu proses produksi terjadi setelah adanya hasil kerja diperoleh dari aktivitas usaha. Permasalahan

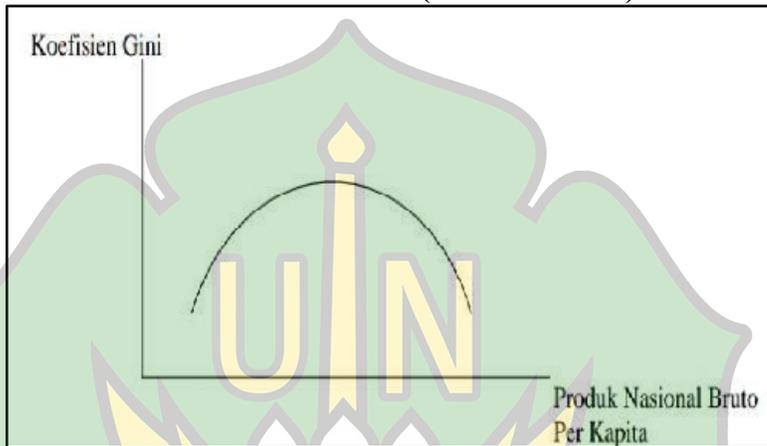
pengukuran pemerataan sudah lama digunakan pada kalangan ilmuwan. Akan tetapi pendekatan pengukuran yang umum digunakan dalam mengukur ketimpangan cara perbuatan hasil kerja yaitu koefisien Gini yang biasanya dibantu menggunakan kurva Lorentz. Pemerataan hasil kerja yang kurang dapat berdampak terhadap rendahnya daya beli masyarakat, sehingga terjadinya peristiwa yang tidak menyenangkan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan antipati terhadap golongan berpenghasilan tinggi, akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam diri.

Menurut Todaro dalam Nazipawati (2019) Ketimpangan hasil kerja memiliki dampak baik dan buruk, dampak baik dari bahagia. adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang berkembang untuk mampu bersaing dan meningkatkan pertumbuhan guna untuk meningkatkan keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran dalam menjaga atau memelihara serta tertib dalam masyarakat dan sebagainya, keselamatan dan keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, dampak buruk dari keprihatinan lain dalam efisiensi ekonomi antara. lain adalah sosial dan solidaritas, serta melihat bahwa yang tinggi umumnya dianggap tidak adil.

Teori ketimpangan distribusi pendapatan bisa diartikan timbulnya sebuah hipotesis yakni hipotesis “U-terbalik” yang dipaparkan Nazipawati (2019) dalam Simon Kuznet menjelaskan bahwasanya pada awalnya saat pembangunan dimulai, jadi

distribusi pendapatan akan semakin makin tidak merata, akan tetapi sesudah meraih sebuah tingkat pembangunan, maka distribusi pendapatan bisa semakin merata.

Gambar 2.1
Kurva 'U' Terbalik (Kurva Kuznet)



Sumber: Kuncoro dalam Nazipawati (2019)

Pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa hasil kerja semakin tidak merata, akan tetapi sesudah mencapai sebuah tingkat pembangunan yang dikehendaki, maka dapat menyebabkan cara perbuatan semakin merata. Ada sejumlah tahapan penurunan serta peningkatan ketimpangan hasil kerja yang Kuznet jelaskan tidak bisa dihindarkan, akan tetapi semuanya bergantung terhadap tahap mebangunan yang sedang dilakukan setiap negara atau bangsa (Galbraith dan Kum dalam Alin, 2019).

Simon Kuznets meringkaskan bahwa hasil kerja rata-rata per kapita di awal pembangunan masih rendah serta ketimpangan masih rendah pula. Disaat hasil kerja rerata meningkat

menyebabkan ketimpangan ikut mengalami peningkatan. Selanjutnya disaat hasil kerja rerata naik menyebabkan ketimpangan menurun seperti sedia kala. Seperti contohnya yang ada dalam bidang perekonomian ataupun pertanian, dalam langkah awal pertumbuhan bisa meningkatkan hasil kerja yang makin giat serta kemungkinan besar terdapat hubungannya pada penurunan hasil kerja yang diakibatkan oleh penurunan harga.

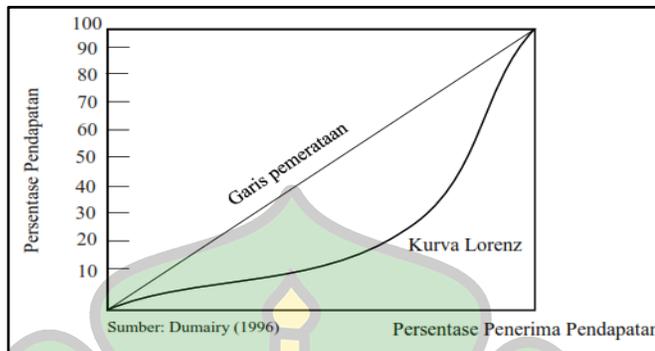
2.1.2 Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Cara untuk melakukan pengukuran apakah Distribusi pendapatan timpang atau tidak, hal ini dapat digunakan kelompok Kurva Lorenz, dengan memakai koefisien gini serta kriteria yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Beragam instansi berupaya terus dalam melakukan pengembangan alat ukur dari ketimpangan cara perbuatan hasil kerja dimasyarakat, pemakaian tata cara statistika serta matematik senantiasa dikembangkan guna mendapatkan pengukuran yang paling obyektif untuk mengukur suatu hal yang sifatnya subyektif.

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menjelaskan tentang cara perbuatan kumulatif hasil kerja nasional di kalangan masyarakat. Kurva ini nantinya terletak dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif hasil kerja nasional, dan di sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif masyarakat. Kurvanya diletakkan pada diagonal bujur sangkar.

Gambar 2.2
Kurva Lorenz



Kurva Lorenz jika semakin dekat dengan diagonal maka cara pembuatan hasil kerja nasional semakin merata, dan sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal maka menunjukkan keadaan yang semakin tidak membaik, dan cara pembuatan hasil kerja nasional semakin timpang sehingga terjadinya ketidakmerataan (Arsyad dalam Permana, 2017).

2. *Gini Ratio*

Corrado Gini seorang statistisi dan ahli sosiologi dari Italia yang pertama kali menemukan *Gini Ratio* pada tahun 1912 didalam karyanya yang berjudul “*Variability and Mutability*” (dalam bahasa Italia: *Variabilità e mutabilità*), yang melihat adanya korelasi antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau per orang dengan total pendapatan.

Ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal yaitu Indeks Gini, kurva Lorenz dibagi menjadi luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini berada di antara nol dan satu. Jika nilai indeks Gini mendekati nol

menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan jika nilai indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Indeks Gini digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah hasil kerja yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total hasil kerja. Besaran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks Gini meliputi: 1) jumlah rumah tangga atau masyarakat; 2) rata-rata hasil kerja atau pengeluaran rumah tangga yang telah dikelompokkan menurut kelasnya (Todaro dalam Ramdani, 2015).

Gini rasio umumnya digambarkan oleh suatu kurva yang bernama Kurva Lorenz dimana kurva ini mempunyai garis diagonal yang memperlihatkan bahwasanya makin dekat persebaran suatu titik mendekati kurva itu menyebabkan hasil kerja pada sebuah kawasan makin merata sebaliknya makin tersebar sejumlah titik menjauhi garis diagonal tersebut menyebabkan makin senjang hasil kerja pada kawasan bersangkutan.

3. Bank Dunia

Bank Dunia sesungguhnya menggunakan ukuran tidak sekompleks sejumlah pengukuran yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pengukuran yang dipakai Bank Dunia itu hanya peralatan statistik deskriptif. Bank Dunia menyebutkan bahwa kesenjangan cara perbuatan hasil kerja dihitung melalui pengukuran jumlah prosentase hasil kerja masyarakat dari masyarakat yang berhasil kerja rendah dengan jumlah hasil kerja keseluruhan masyarakat. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa ketimpangan cara perbuatan hasil kerja diukur dengan cara

menghitung jumlah persentase hasil kerja setiap masyarakat dari setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah kemudian membandingkan dengan total jumlah penghasilan keseluruhan dari masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Indikator Ketimpangan	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat
Kelompok ketimpangan. Tinggi	40% masyarakat berpenghasilan rendah dan menerima < 12% dari total penghasilan
Kelompok ketimpangan. Sedang	40% masyarakat berpenghasilan rendah dan menerima 12%-17% dari total penghasilan
Kelompok ketimpangan Rendah	40% masyarakat berpenghasilan rendah dan menerima > 17% dari total penghasilan

Sumber: World Bank (2015)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas menjelaskan kriteria ini bisa diketahui, contohnya apabila 40% masyarakat dengan penghasilan terendah menerima 20% total penghasilan atau hasil kerja nasional, maka dapat disimpulkan bahwa cara pembuatan hasil kerja dengan kelompok bisa berubah-ubah rendah.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ketimpangan merupakan ketidakadilan atau ketidak mertaan. Ketimpangan merupakan permasalahan yang dapat menyebabkan

kesejajaran ekonomi atau ketidak merataan yang biasanya terjadi di Negara atau suatu wilayah yang sedang berkembang. Ketimpangan akan berdampak terhadap munculnya masalah kesenjangan ekonomi seperti bertambahnya jumlah masyarakat miskin, pengangguran semakin bertambah, dan kemampuan daya beli masyarakat menurun dikarenakan harga kebutuhan meningkat sedangkan pendapatannya melemah (Huda, 2015: 97).

Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidak merataan distribusi pendapatan pada negara yang tengah berkembang sesuai pendapat Adelman & Morris dalam Huda & Heykal (2015: 76) yakni:

1. Menurunnya pendapatan perkapita yang disebabkan penambahan penduduk yang tinggi.
2. Inflasi yang mana pendapatan uang mengalami penambahan namun tak diikuti secara proporsional oleh penambahan produksi kebutuhan pokok.
3. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah atau kota.
4. Jumlah dana yang besar pada sejumlah proyek, jadi prosentase pendapatan modal dari tambahan harta melebihi prosentasi pendapatan yang asalnya dari kerja, jadi terdapat penambahan pengangguran.
5. Tidak terjadi peningkatan mobilitas sosial.
6. Kebijakan pelaksanaan industri substitusi impor yang menyebabkan naiknya sejumlah barang hasil industri guna

memberi perlindungan bagi usaha golongan orang yang memiliki modal yang cukup besar dalam perdagangan.

7. Melemahnya nilai tukar (*term of trade*) untuk negara yang tengah berkembang didalam perdagangan ekonomi dengan negara yang lebih maju, yang berdampak terhadap ketidakpastian permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Melemahnya daya saing sejumlah industri kerajinan rakyat, semacam pertukangan serta industri olahan rumah tangga.
- 9.

2.1.4 Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berhubungan erat pada ketimpangan, menjadi alat untuk mencapai keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran dalam menjaga atau memelihara serta tertib dalam masyarakat dan sebagainya, keselamatan dan keadaan dimana merasakan ketenangan baik tenang hati maupun pikiran di dunia dan akhirat, sebagai hamba Allah harus memprioritaskan cara perbuatan hasil kerja, kekayaan dan pemerataan menjadi amat penting didalam ekonomi Islam. Tiap manusia harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Negara bertanggungjawab terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai seseorang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Negara memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan minimal semua rakyatnya (Q.S. Al-Ruum: 38-39).

Perbuatan atau perlakuan yang ditegakkan secara merata dapat mencegah terancamnya masa depan sosial ekonomi suatu negara. Sebagai pemimpin harus harus mencegah terjadinya ketimpangan hasil kerja untuk memajukan suatu bangsa dan negara. Karena standard kehidupan yang rendah dijadikan penghalang untuk kemajuan sebuah umat jadi diperlukan jalan keluar yang wajib diselesaikan umat secara menyeluruh (Swasono, 2020).

Perbuatan atau perlakuan merupakan prinsip utama dalam distribusi pendapatan dan kekayaan sesuai dengan norma yang dapat diterima umum (Pusat Pengkajian dan Pengembangan. Ekonomi Islam, 2020). Perbuatan atau perlakuan ialah penilaian yang pas pada sejumlah faktor kebijakan serta produksi, harga, hasilnya selaras pada takaran serta yang wajar dan ukuran yang pas ataupun kadar yang sesungguhnya (Swasono, 2020). Perbuatan atau perlakuan dapat juga diartikan sebagai kebijaksanaan mengalokasikan hasil dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui zakat, infak dan sedekah (Muhammad, 2018). Hadis Nabi Muhammad SAW: “Saya bersumpah kepada Allah; bukanlah orang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan”. Ayat-ayat dan hadis di atas memperlihatkan bahwasanya cara perbuatan hasil kerja serta kekayaan wajib merata untuk semua manusia selaras pada kemampuan mental, fisik,

wawasan serta keterampilan didalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Imbas atau keterlibatan pandangan ini ialah keberadaan persaudaraan universal, yang selanjutnya memunculkan persamaan sosial serta membuat SDA menjadi amanah sebab statusnya selaku wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta. Chapra memberi penegasan bahwasanya persaudaraan akan hampa apabila tidak dikuatkan oleh. Perbuatan atau perlakuan didalam. Alokasi resources, yang telah diberikan oleh Allah Swt (Chapra, 2020). Prinsip ini tidak menginginkan keberadaan pemusatan harta serta penghasilan hanya bagi beberapa orang serta guna melakukan perbaikan Keadaan beban negara terselubung atau tidak memiliki pekerjaan yang tidak terbatas serta mengurangi kesenjangan hasil kerja dan kekayaan (Thurow dalam Asytuti, 2016).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan cara perbuatan hasil kerja adalah sebuah proses membagi hasil produk pada sejumlah faktor produksi yang berperan meentapkan hasil kerja. Rancangan cara perbuatan hasil kerja sesuai dengan perspektif Islam ialah membagi kekayaan supaya perputaran kekayaan bisa meningkat, jadi kekayaan bisa melimpah secara rata serta tidak diedarkan hanya pada suatu golongan. Pencara perbuatanan secara adil dan merata merupakan prinsip ekonomi dalam Islam.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi adalah proses kenaikan hasil yang diperoleh per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sifatnya dinamis, perekonomian mengalami perkembangan dan dapat mengalami perubahan tiap waktunya (Budiono, 2017). Pertumbuhan ekonomi ialah sebuah ukuran kuantitatif yang merepresentasikan perkembangan sebuah ekonomi 1 tahun dari pada tahun terdahulu serta senantiasa pada ukuran persen (Sukirno, 2016). Indikator dari pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) serta *Gross National Product* (GNP).

Pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya suatu kapasitas dengan kurun waktu yang lama dari suatu negara untuk memenuhi kebutuhan berbagai barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan dengan adanya kemajuan dibidang teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan semestinya. Terdapat tiga komponen pokok berdasarkan pengertiannya sehingga sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu, antara lain:

1. Tingginya kenaikan output secara berkelanjutan merupakan wujud pertumbuhan ekonomi, kemudian kemampuan penyediaan beragam jenis barang adalah tanda matangnya ekonomi itu pada negara yang ada sangkut pautnya.

2. Dasar prakondisi untuk keberlangsungan sebuah pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan perkembangan dari teknologi, hal ini merupakan suatu kondisi yang diperlukan, tidak hanya disini saja, akan tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang diperlukan.
3. Dalam terwujudnya potensi pertumbuhan terkadang di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian kelembagaan, sikap, dan ideologi dalam suatu negara.

2.2.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Diperlukan alat ukur yang tepat dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan sebuah perekonomian. Menurut Nugraheni & Kristanto (2016) ada dua alat ukur yang dapat dilakukan untuk mengukur ekonomi yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau ditingkat Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah atas suatu barang dan jasa akhir yang mampu dihasilkan oleh sebuah negara dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Baik PDB ataupun PDRB adalah ukuran yang menyeluruh fisiknya serta bukan alat ukur ekonomi yang pas, dikarenakan belum bisa dirasakan kesejahteraannya oleh penduduknya, sebenarnya kesejahteraan yang wajib dirasakan tiap masyarakat pada sebuah negara ataupun kawasan.

2. Produk Domestik Bruto per kapita/Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Bruto per kapita per kapita pada skala di suatu kawasan menggunakan menjadi alat ukur pertumbuhan ekonomi kearah yang makin baik, hal ini dikarenakan makin cemat menginginkan kesejahteraan rakyat pada sebuah negara dibandingkan nilai PDRB ataupun PDB saja. PDB per kapita baik tingkat nasional ataupun kota dibagi oleh total penduduk dalam negara maupun pada kota yang ada di negara tersebut, ataupun bisa disebut menjadi PDB atau PDRB rata-rata.

2.3 Pengangguran

2.3.1 Konsep dan Cara Pengukuran Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah realita yang dihadapi oleh siapa saja baik secara individu maupun secara kelompok yang belum mendapatkan pendapatan. Secara menyeluruh pengangguran dapat diartikan menjadi sebuah situasi ketika individu tersebut yang masuk kedalam angkatan kerja (*labor force*) atau tidak mempunyai pekerjaan tetap serta tengah mencari kerja. Individu tidak bekerja namun selalu aktif mencari kerja, ini bisa dikategorikan menjadi penganggur. Pengukuran pengangguran pada sebuah negara dipakai apa yang disebut tingkat pengangguran adalah total tingkat pengangguran disebut menjadi prosentase jumlah tidak bekerja. Selanjutnya angkatan kerja merupakan total individu yang bekerja serta tak bekerja, dan individu tersebut ada pada kelompok usia tertentu di Indonesia, contohnya yang masuk kedalam angkatan

kerja yaitu individu yang berusia diatas 10 tahun, sementara pada Amerika Serikat yaitu individu yang berumur yang berkisar 15 sampai 64 tahun.

Menurut *World Bank* pengangguran menuangkan pada bagian dari individu tidak bekerja dan tersedia dalam mencari pekerjaan. Menurut Case & Fair (2017:54-55) mengelompokkan ada tiga jenis pengangguran, yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran.friksional adalah pengangguran.yang terjadi akibat mekanisme normal di pasar tenaga.kerja. Tingkat pengangguran friksional tidak sama dengan nol, dan mungkin berubah dari masa ke masa. Pengangguran friksional menunjukkan masalah penyesuaian masalah pekerjaan atau keahlian dalam jangka waktu yang singkat.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi dikarenakan adanya perubahan struktur perekonomian yang disebabkan hilangnya pekerjaan secara signifikan di dalam sebuah industri.

3. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis dapat terjadi dikarenakan selama adanya resesi dan depresi. Hal ini dikarenakan perusahaan berproduktivitas sedikit, dibandingkan banyaknya yang membutuhkan pekerjaan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Case dan Fair (2017) sesuai dengan definisinya, pengangguran bisa dikelompokkan kedalam 3 jenis, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran dimana dikategorikan sudah usia angkatan kerja, akan tetapi tidak memiliki pekerjaan. Adanya pengangguran terbuka ini dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan, padahal sudah mencari pekerjaan dengan serius, dan ada juga sebagian orang yang bermasalahan dalam mencari pekerjaan.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung adalah pengangguran terjadi dikarenakan banyaknya individu untuk satu jenis pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produktivitas. Pengangguran terselubung terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimilikinya, dan akhirnya bekerja tidak bias optimal. Ketidak sesuaian bidang yang dikerjakan dengan skill yang dimiliki membuat karyawan-karyawan tersebut bekerja tidak optimal dan bagi perusahaan itu merupakan suatu pemborosan.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) merupakan pengangguran dimana orang bekerja akan tetapi tenaganya kurang

dibutuhkan diukur dari curahan jam kerja, produktifitas kerja dan penghasilan kerja yang diperoleh (Case dan Fair, 2017:54-55).

2.3.3 Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Semua Negara terus berupaya supaya tingkat kemakmuran masyarakatnya bisa dimaksimalkan serta perekonomian senantiasa pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan dan berkelanjutan (*sustained economic growth*). Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memungkinkan masyarakat atau sekelompok masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Hal tersebut dengan jelas dilihat dari berbagai pengaruh buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Faktor-faktor buruk pengangguran terhadap perekonomian, antara lain:

1. Pengangguran mengakibatkan masyarakat atau suatu kelompok tidak bisa memaksimalkan tingkat kesejahteraannya yang akan dicapai. Pengangguran mengakibatkan output aktual yang dimiliki dibawah output potensial. Situasi tersebut lah yang diartikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicapai lebih rendah dari pada tingkat yang kemungkinan hendak dicapai.
2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (*tax revenue*) pemerintah disuatu daerah berkurang. Rendahnya tingkat kegiatan ekonomi terjadi diakibatkan banyaknya pengangguran, pada gilirannya akan mengakibatkan perolehan pajak yang kemungkinan didapatkan pemerintah

menjadi makin sedikit. Dalam hal ini, tingkat pengangguran yang tinggi bisa membuat kemampuan pemerintah didalam menjalankan beragam aktivitas pembangunan meningkat di suatu kawasan, misalkan terkendala masalah pembuatan sarana dan prasaran dalam kota maupun di pedesaan.

3. Pengangguran yang tinggi bisa membuat pertumbuhan ekonomi terhambat. Pengangguran dapat menciptakan 2 dampak buruk bagi aktivitas sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja umumnya diikuti oleh kelebihan kapasitas sejumlah mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang muncul sebagai dampak dari permasalahan aktivitas perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Rendahnya keuntungan yang didapatkan perusahaan membuat kehendak perusahaan berinvestasi jadi kurang. Kedua hal itu jelas tidak akan menggalakan pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan kehidupan dalam bermasyarakat yang serba kekurangan yang dialami individu atau sekelompok individu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari

(kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder). Garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS merupakan total pengeluaran yang diperlukan tiap seseorang dalam memenuhi keperluan makanannya setara pada 2100 kalori setiap individu dalam sehari serta kebutuhan non makanan yang tersusun atas pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi juga aneka jasa serta barang yang diperlukan.

Menurut Suryanto dalam Mustika (2018) menyatakan bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang didalihkan karena situasi tatanan kehidupan ataupun situasi struktur tak memiliki keuntungan. Selanjutnya kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang didasari oleh faktor-faktor adat dan budaya sebuah daerah yang mengikat individu agar senantiasa lekat pada indikator kemiskinan. Sedangkan kemiskinan absolut merupakan sejumlah masyarakat yang tidak mampu mendapatkan upah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana seseorang yang hidup dibawah tingkat pendapatan minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan nasional”.

Kemiskinan merupakan suatu gejala penurunan penghasilan atau kemampuan masyarakat ataupun sekelompok masyarakat ataupun wilayah jadi dapat memberikan pengaruh bagi kebutuhan hidup individu ataupun kelompok itu, yang mana pada sebuah keadaan dengan nyata seseorang tak bisa meraih kehidupan yang semestinya (Mencher, 2020). Kelatarbelakangan serta kemiskinan ekonomi dengan demikian adalah 2 istilah yang sinonim. Sebuah

negara disebut miskin sebab negara terbelakang. Negara terbelakang sebab ia miskin serta senantiasa terbelakang sebab tidak memiliki sumber yang dibutuhkan guna meningkatkan pembangunan.

2.4.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut Tambunan dalam Istriana (2020) Pada dasarnya indikator dalam melakukan pengukuran tingkat kemiskinan pada sebuah kawasan, yakni kemiskinan relative serta absolut.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah individu tidak mampu dengan penghasilan yang didapatkannya memenuhi keperluan dasar minimal yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan setiap hari. Keperluan ini dipakai menjadi batasan garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang diberlakukan dalam tingkat yang senantiasa stabil secara nyata, jadi nantinya bisa dicaritau kemajuan yang didapatkan didalam melakukan penanggulangan kemiskinan dalam level absolute sepanjang masa.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditetapkan sesuai dengan ketidakmampuan mencapai standard kehidupan yang masyarakat setempat tetapkan jadi prosesnya amat subyektif. Mereka yang ada dibawah standard penilaian itu dikelompokkan menjadi miskin secara relative.

Kemiskinan ini dipakai guna mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang mengacu pada sikap individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk mengubah hidup kearah lebih baik. Kemiskinan struktural juga dapat diartikan menjadi kemiskinan yang diderita kelompok masyarakat dikarenakan struktur sosial kelompok masyarakat yang tak bisa memakai pencaharian yang sesungguhnya. Kemiskinan struktural juga mencakup kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan kurangnya komunikasi bersama masyarakat atau kelompok lainnya.

4. Kemiskinan kronis

Kemiskinan kronis merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh keadaan sosial budaya yang memberi dorongan sikap serta kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat yang tak produktif. Terbatasnya sumber daya serta tinggal dipedalaman. Pendidikan yang rendah serta rendahnya perawatan kesehatan, juga lapangan kerja yang terbatas bagi masyarakat serta ketidak berdayaan masyarakat didalam mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara merupakan dampak berubahnya siklus ekonomi dari situasi normal jadi krisis ekonomi dalam masyarakat, perubahan yang sifatnya musiman, bencana alam ataupun efek

yang ditimbulkan dari sebuah hal yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan sebuah masyarakat.

2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Itang (2016) permasalahan kemiskinan terjadi karena beragam faktor. Namun faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan, antara lain:

1. Pendidikan seseorang yang rendah membuat kurangnya keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup. Dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan inilah membuat seseorang sulit menjangkau dunia kerja.
2. Malas bekerja atau sikap seseorang yang lebih nyaman dengan nasib sehingga individu tidak bergairah untuk mengembangkan kualitas hidupnya.
3. Keterbatasan sumber daya alam juga menjadi penyumbang penyebab Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi ketika sumber daya alam tidak mampu lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan.
4. Lapangan kerja yang terbatas akan berdampak serius pada Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat. Secara ideal individu harus mampu membangun lapangan kerja baru

sedangkan kenyataannya sangat sulit dilakukan karena keterbatasan modal dan keterampilan yang dimiliki.

5. Keterbatasan modal, dengan modal yang terbatas seseorang sulit untuk menerapkan keterampilan maupun memenuhi alat yang digunakan untuk memperoleh keterampilan.
6. Beban keluarga juga berpengaruh besar penyebab Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat, apabila seseorang mempunyai tanggungan hidup sehingga meningkatkan tuntutan hidup atau beban yang harus dipenuhi namun tidak diimbangi dengan hasil kerja maka akan menimbulkan Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat.

Menurut Isdjoyo (2020) pemicu Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat yang terjadi di era sekarang ini dan terjadi di desa maupun di kota banyak penyebabnya, antara lain:

1. Ketidakberdayaan. Penyebabnya karena individu atau masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan karena mahal biaya pendidikan, harga barang yang mereka produksi tergolong murah, dan lapangan kerja sempit.

2. Terkucilkan, keahlian yang terbatas, pendidikan rendah, akses transportasi sulit sehingga susah melakukan kesiapsiagaan untuk bergerak, dan sulit mengakses kredit sehingga berdampak pada Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat.
3. Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat materi, disebabkan oleh kurangnya modal dan lahan yang terbatas untuk dimanfaatkan sehingga berimbas pada hasil kerja yang kecil.
4. Kerentanan, kesukaran untuk memperoleh pekerjaan, usaha yang dimiliki sifatnya musiman, bencana alam, sehingga membuat mereka rentan terhadap Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat.
5. Sikap menerima nasib apa adanya dan tidak termotivasi untuk bekerja keras juga menjadi penyebab Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan yang kemukakan oleh Kuncoro (2020) sebagai berikut:

1. Secara besar, Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat ini dapat terjadi adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menghasilkan cara pembuatan hasil kerja timpang, masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya juga rendah.
2. Suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan jabatan yang layak atau tahta yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat lemahnya ekonomi masyarakat muncul mengakibatkan perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah sehingga berdampak kepada rendahnya uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

2.5 Konsep Kesejahteraan

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi agregat dari kepuasan masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat

hidup lebih stabil dan layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi social dalam masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara atau wilayah tempat tinggalnya, yang mengakibatkan masih ada warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat dan selaras dengan masyarakat lain pada umumnya.

Kesejahteraan merupakan kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk membangun suatu perubahan dan meningkatkan kelayakan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa segi yaitu sosial, ekonomi dan pendidikan melalui program atau proses pemberdayaan masyarakat dalam mengubah standar kehidupan yang lebih layak (Notowidagdo, 2016:38). Kesejahteraan dapat berjalan dan menciptakan rasa aman dan nyaman dan kelayakan hidup yang didapatkan kelompok masyarakat serta terjamin kehidupan yang layak. Pemberian pelayanan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat untuk menciptakan tatanan usaha dan pengelolaan potensi alam merupakan strategi utama dalam membentuk suatu kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya

dapat diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, akan tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita secara perorangan, akan tetapi juga menjadi tujuan sekumpulan masyarakat yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, kedua macam kesejahteraan yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan bentuk kegiatan terorganisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilihat kemajuan dari segi sosial dalam menjamin bantuan hak-hak dan pelayanan yang terjamin oleh Negara (Athur, Sukoco, dalam Sari, 2020).

Maka dari pendapat di atas dapat disimpulkan kesejahteraan merupakan proses dalam mencapai suatu kesejahteraan melalui tahap-tahap dan prinsip-prinsip yang di perlukan didalamnya. Pemberian bantuan atau pelatihan baik berupa pemberian bekal keterampilan atau kemampuan pengelolaan potensi dapat dijadikan sarana dalam pengentasan keterbelakangan kesejahteraan terutama masalah kemiskinan memberikan kontribusi dalam masyarakat.

2.5.2 Indikator Kesejahteraan

Kegunaan melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah menurut Badan Statistik Pusat (2020) menerangkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu:

1. Tingkat pendapatan keluarga/kepala keluarga (tinggi/rendah)

2. Bahan pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan dengan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga (Sekolah/tidak)
4. Tingkat kesehatan keluarga (Riwayat penyakit)
5. Keadaan perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Ada beberapa cara untuk mengukur kesejahteraan. Menurut Koller dalam Bintarto (2019) terdapat empat cara yang dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dilihat dari segi kelayakan hidup, misalkan dari segi materi, seperti rumah layak huni, dan kecukupan bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas hidup baik dari segi fisik, misalkan kesehatan tubuh, lingkungan alam sekitarnya.
3. Dilihat dari segi kualitas hidup misalkan segi mental, fasilitas pendidikan (kamar tidur, kulkas, lemari dan lain-lain, serta lingkungan budaya.
4. Dilihat dari segi kualitas hidup seperti segi spiritual, seperti moral, etika, dan keserasian penyesuaian.

2.6 Pendapatan Masyarakat

2.6.1 Pengertian Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pendapatan merupakan hasil dari pekerjaan atau usaha yang telah dilakukan. Pendapatan adalah sebuah hal yang sangat penting untuk menjadi

penentu rugi untungnya sebuah usaha. Pendapatan didapatkan dari membandingkan pendapatan dengan biaya yang suatu usaha keluarkan. Pendapatan bisa dipakai menjadi indikator ataupun ukuran didalam melakukan penilaian mencapai kesuksesan sebuah usaha. Pendapatan adalah nilai total jual dari suatu produksi usaha setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan merupakan salah satu ukuran yang menonjol dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha (Sukirno dalam Suryaningsih, 2021).

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan gaji ataupun balas jasa hasil usaha yang didapatkan individu ataupun kelompok setelah bekerja sepanjang 1 bulan guna memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya pendapatan dari usaha sampingan merupakan pendapatan tambahan yang adalah penerimaan lainnya diluar jam kerja ataupun sering disebut lembur. Pendapatan sampingan yang didapatkan serta dipakai guna menambahkan pendapatan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan pendapatan tidak saja dilihat melalui totalnya, akan namun bagaimanakah distribusi pendapatan yang diterima oleh sekelompok masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan pengeluaran di Indonesia, antara lain:

1. Perolehan faktor produksi, faktor yang terpenting adalah tanah.

2. Laju produksi pedesaan, dalam permasalahan ini yang terpenting adalah produksi pertanian dan arah gejala harga yang diberikan kepada produksi.

Tingkat pendapatan adalah salah satu indikator maju atau tidaknya suatu kawasan. Jika pendapatan suatu kawasan relatif rendah, maka dikatakan kemajuan dan kesejahteraan akan rendah juga. Kelebihan uang yang didapatkan setelah membeli kebutuhan sehari-hari, maka uang tersebut akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk menabung untuk keperluan yang mendadak. Dan sebaliknya jika pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut akan tinggi juga (Danil 2016: 62).

2.6.2 Populasi Masyarakat (Penduduk)

Jumlah atau populasi masyarakat adalah keseluruhan orang yang tinggal di kawasan tersebut baik dalam jumlah banyak maupun berjumlah sedang. Pertambahan jumlah anggota masyarakat menjadikan kompetisi dasar dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih susah. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator terpenting dalam suatu daerah. Menurut Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor utama dalam produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga. Semakin banyak

kelompok masyarakat maka semakin banyak pula tenaga kerja yang digunakan. Oleh karena itu jumlah masyarakat yang terus bertambah, maka banyak yang harus dipikirkan dalam mengatasi masalah pekerjaan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dijadikan sumber informasi untuk meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan dalam suatu daerah dapat dicapai sesuai keinginan yang telah dicanangkan (Murty, 2020: 62). Serta pada pertambahan total penduduk tiap tahunnya yang dengan langsung memerlukan lapangan kerja, akan tetapi luas lahan serta fasilitas lain tak mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa membuat tingkat pengangguran meningkat.

2.7 Temuan Penelitian Terkait

2.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Teori pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bidang ilmu yang menyelidiki yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mahzab Merkantilis, merupakan pemikir-pemikir ekonomi di antara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, umumnya membahas tentang peranan perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini merupakan kejadian penting yang

dialami dunia hanya semenjak dua abad ini. Periode ini dunia telah mengalami perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Mark beranggapan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di tahapan awal bisa membuat permintaan tenaga kerja meningkat. Peningkatan tingkat upah dari tenaga kerja berikutnya akan memberikan memberikann pengaruh bagi naiknya risiko capital pada tenaga kerja jadi permintaan tenaga kerja menurun. Dampaknya muncul isu pengangguran serta kesenjangan pendapatan. Singkat cerita, pertumbuhan ekonomi relatif dapat membuat permasalahan kemiskinan berkurang serta ketimpangan distribusi pendapatan dalam tahap awal pembangunan saja, kemudian akan terjadi sebaliknya (Ma'mun, 2018:33-34).

2.7.2 Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan

Mankiw, Quah, & Wilson (2017) menjelaskan pengangguran merupakan seseorang atau individu yang berhenti bekerja sementara atau tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin meningkat pengangguran, semakin banyak pula golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai penghasilan atau pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat mempengaruhi menurunkan upah golongan berpendapatan kebawah (rendah) sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi (Sukirno, 2016). Kondisi seperti ini yang menyebabkan bahwa lowongan kerja harus

disediakan dan harus diciptakan sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja, supaya pembagian pendapatan menjadi merata.

Untuk memperjelas penjelasan di atas berikut ini ada beberapa penelitian terkait pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Pengangguran menambah secara signifikan tingkat ketimpangan di antara masyarakat. Pi & Zhang (2018) mengungkapkan bahwa pengangguran sektoral di sektor terampil perkotaan mengakibatkan ketimpangan upah menjadi lebih luas, jika rasio modal tenaga kerja di sektor ini lebih dari satu. Efriza (2017) juga menjelaskan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian diparagraf di atas maka, apabila pengangguran semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat juga. Jadi, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan adalah positif.

2.7.3 Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2017). Kemiskinan dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka

kemiskinan dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara berkembang semakin meningkat pula. Oleh karena itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, supaya ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Adapun beberapa penelitian terkait korelasi pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Hassan et al. (2017) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Syawie (2017) menjelaskan bahwa pada kapasitas tertentu, kemiskinan memang sangat berkaitan dengan kesenjangan. Akan tetapi, kemiskinan yang berkurang bukan berarti akan mengurangi ketimpangan. Penemuan Syawie juga didukung oleh Afandy, Rantung, & Marshdeh (2017) yang menjelaskan bahwasanya angka kemiskinan yang semakin rendah justru akan menaikkan ketimpangan, sehingga solusi atau langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan dapat bersifat memihak pada ketimpangan, melainkan dibiarkan ketimpangan semakin meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khairul Amri (2017) Universitas Syiah	Analisis pertumbuhan ekonomi	Data yang digunakan didalam	Hasil penelitian menunjukkan	Variabel dependen yaitu	a. Objek penelitian

Tabel 2.2-Lanjutan

	Kuala	dan ketimpangan pendapatan di Sumatra	penelitian ini yaitu data Badan Statistik Indonesia. Ketimpangan pendapatan diukur dengan <i>gini ratio</i> .	n tidak terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.	ketimpangan pendapatan	b. Lokasi penelitian
2	Hindun (2019) Universitas Negeri Surabaya	Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia	Data sekunder dengan pendekatan kuantitatif.	Variabel pendidikan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh. Kemudian, pendidikan, dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. Objek penelitian b. Lokasi penelitian c. Data yang digunakan
3	Nurlina, Candra (2017) Universitas Samudra Langsa	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh	Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan, karena semakin tinggi	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. Objek penelitian b. Jenis penelitian

Tabel 2.2-Lanjutan

				pertumbuhan ekonomi maka distribusi pendapatan semakin merata		
4	Pangkiro, Rotinsulu, Wauran (2016) Universitas Sam Ratulangi	Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara.	Data yang digunakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data kemiskinan dan Disparitas ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2013	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka Disparitas Ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka Disparitas Ekonomi.	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. Objek penelitian b. Tempat penelitian
5	Istikharoh, Prijanto, Destiningsih (2019) Universitas Tidar	Analisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan pendekatan <i>common effect model</i> .	Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. Objek penelitian b. Tempat penelitian c. Variabel independen

Tabel 2.2-Lanjutan

				ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018.		
6	Arif (2017) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ketimpangan pendapatan di propinsi Jawa timur beserta faktor yang mempengaruhi	Jenis penelitian deskripsi kuantitatif dengan data yang digunakan adalah skunder, dengan metode linear berganda	Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan arah koefisien positif	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	d. Objek penelitian e. Lokasi penelitian
7	Kalalo (2016) Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi	Analisis distribusi pendapatan masyarakat di kabupaten minahasa utara	Jenis penelitian deskripsi kuantitatif dengan data skunder dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda	Tingkat pendistribusian pendapatan yang lebih tinggi berada pada..golongan pekerjaan pedagang dan PNS	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. Objek penelitian b. Lokasi penelitian
8	Sri Rahayu (2017)	Analisis tingkat	Metode penelitian.	Tingkat ketimpangan	Variabel dependen	a. Objek peneli

Tabel 2.2-Lanjutan

	Universitas Sumatra Utara	ketimpangan pendapatan dan Kemiskinan petani padi	untuk penentuan. Daerah. dilakukan dengan. metode <i>Purposive</i> . Metode. analisis data. yaitu dengan <i>Gini Ratio</i>	n petani. padi sawah berdasarkan nilai <i>Gin. Ratio</i> sebesar 0,32. berada dalam. kategori rendah, dan menurut kriteria Bank Dunia berada dalam kategori rendah	yaitu ketimpangan pendapatan	a. b. Lokasi penelitian
9	Mohamad Syamsul Hidayat (2018) Universitas Islam Majapahit	Analisis ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Di kota Mojokerto	Menganalisis menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda	Distribusi Pendapatan di Kota Mojokerto mengalami ketimpangan sedang (Moderat) dan Untuk Korva Lorenz semakin mendekati garis diagonal hal ini menunjukkan bahwa distribusi kesetaraan pendapatan di Kota Mojokerto. semakin baik	Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan	a. b. Objek penelitian Lokasi penelitian
10	Meliza (2020) UniversitasMalikus saleh	Analisis ketimpangan pendapatan di	penelitian ini digunakan data sekunder	Ketimpangan yang Digunakan adalah indeks	Variabel Dependen Ketimpangan pendapatan	a. b. Objek penelitian Lokasi

Tabel 2.2-Lanjutan

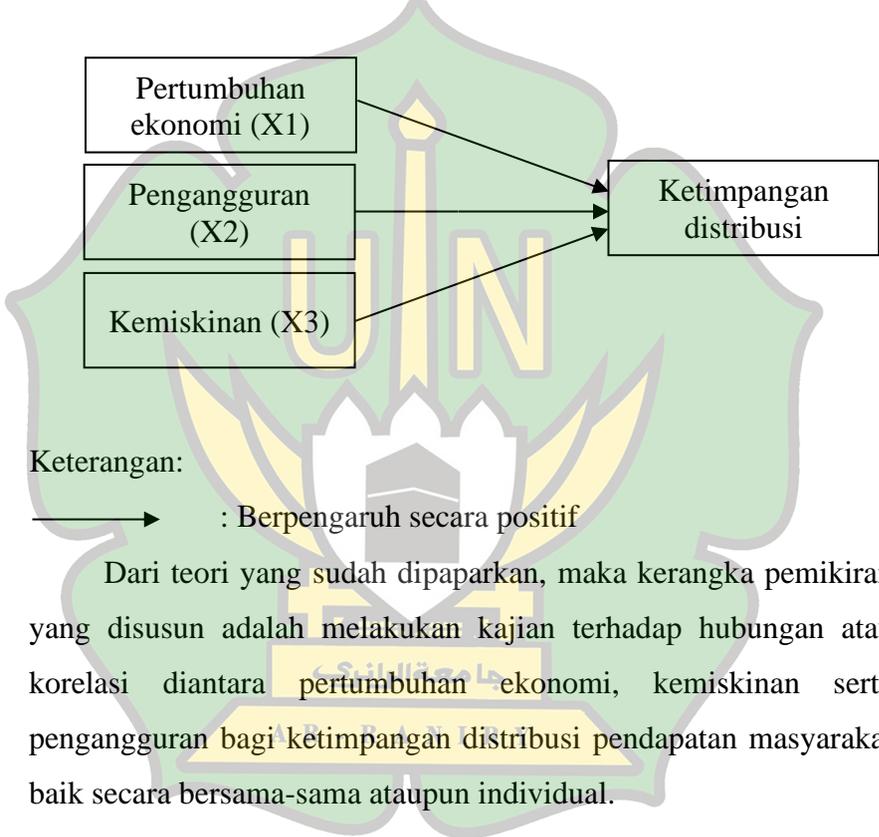
		Provinsi. Aceh	dengan menggunakan teknik persamaan regresi linear berganda	Williamson di Provinsi Aceh dengan kategori cukup tinggi		penelitian
11	Srihardianti, M, Mustafid (2016) Universitas Diponegoro	Metode regresi data panel untuk peramalan Konsumsi energi di Indonesia	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Konsumsi Energi Akhir di Indonesia dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha.	Dalam melakukan pemodelan menggunakan regresi data panel, terdapat tiga metode estimasi model yang dapat digunakan, yaitu Model <i>Common Effect</i> , Model <i>Fixed Effect</i> dan Model <i>Random Effect</i> . Ketiga model ini memiliki asumsi-asumsi tersendiri yang harus terpenuhi agar diperoleh estimasi model yang tepat.	Menggunakan data panel	a. Total konsumsi energi Indonesia (ribuan SBM) sebagai variabel respon (Y)

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengetahui hubungan korelasi antara variabel independen yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi,

serta kemiskinan memberikan pengaruh bagi variabel dependen yaitu kesenjangan distribusi pendapatan. Adapun kerangka berpikir bisa di lihat melalui Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



Keterangan:

→ : Berpengaruh secara positif

Dari teori yang sudah dipaparkan, maka kerangka pemikiran yang disusun adalah melakukan kajian terhadap hubungan atau korelasi diantara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran bagi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat baik secara bersama-sama ataupun individual.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus diuji tingkat kevalidannya. Hipotesis dalam penelitian ini ialah:

H_a : Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif

terhadap ketimpangan distribusi Pendapatan.

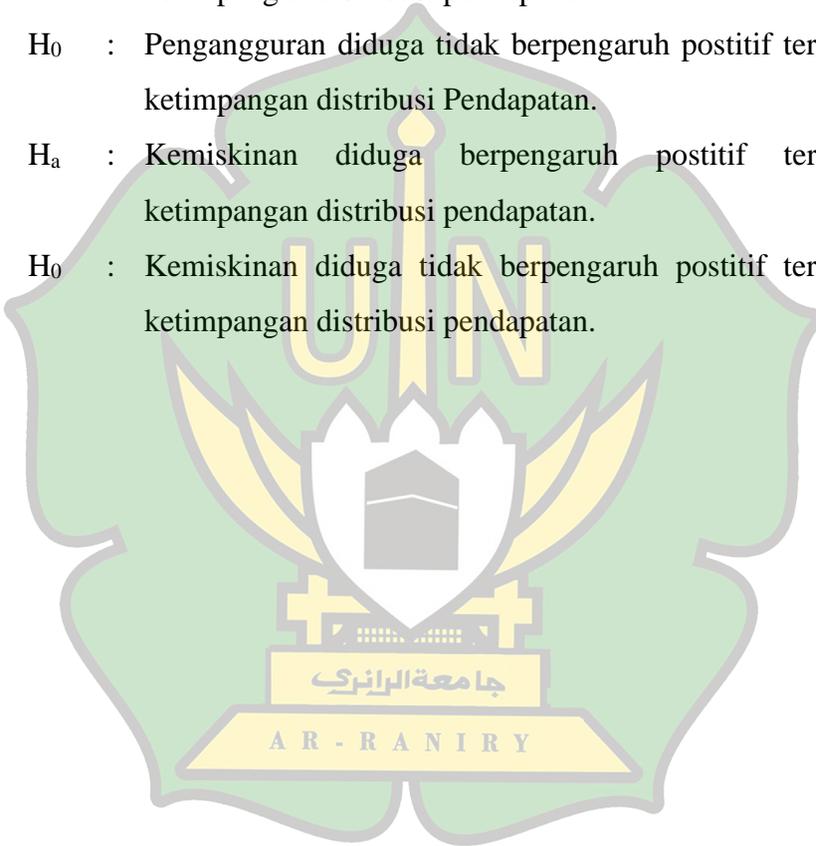
H_0 : Pertumbuhan ekonomi diduga tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

H_a : Pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

H_0 : Pengangguran diduga tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi Pendapatan.

H_a : Kemiskinan diduga berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

H_0 : Kemiskinan diduga tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Metode penelitian kuantitatif menurut penjelasan Sugiyono (2011) penelitian kuantitatif yang berdasarkan filsafat positivism, metode yang dipakai guna meneliti pada populasi atau subjek tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi yaitu menurut Sugiyono (2013:6) penelitian eksplanasi (*explanatory research*) ialah penelitian yang menjabarkan kedudukan antara sejumlah variabel teliti dan hubungan diantara suatu variabel terhadap variabel lainnya melalui uji hipotesis yang sudah dirumuskan. Penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat pada Provinsi Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Menurut Sugiyono, (2014:131) data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian ini diambil dari data pertumbuhan ekonomi, data kemiskinan, data pengangguran dan data indeks

ketimpangan distribusi pendapatan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020 di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel penelitian menurut Sugiyono (2013) merupakan wilayah generalisasi yang tersusun dari: objek atau subjek yang berkualitas serta memiliki suatu karakteristik yang peneliti tetapkan guna dipelajari serta menarik kesimpulan. Sampel ialah sebagian dari populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang meliputi populasi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks ketimpangan distribusi pendapatan.

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan cross cation tahun 2017 sampai tahun 2020 di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Klarifikasi Variabel

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas, adapun variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Variabel independent merupakan variabel yang memberikan pengaruh bagi variabel dependen. Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah data pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

3.4.2 Definisi Operasional

Pada Tabel 3.1 dibawah ini terdapat beberapa ringkasan definisi operasional variabel yang bertujuan untuk mempertegas mengenal variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel independen maupun dependen.

Tabel 3.1 Variabel dan Definisi

Variabel	Definisi	Skala
Pertumbuhan ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan produk nasional bruto dalam suatu negara diperoleh dalam jangka waktu yang panjang	Persentase
Pengangguran (X2)	Pengangguran adalah suatu keadaan tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan	Persentase
Kemiskinan (X3)	Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dalam bermasyarakat yang serba kekurangan.	Persentase
Ketimpangan distribusi pendapatan (Y)	Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang sehingga terjadinya perbedaan pendapatan yang lebih besar antar masyarakat dengan masyarakat yang lain.	Indeks

3.5 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan model penelitian sebagai alat ukur

untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016:154) bertujuan guna melakukan pengujian apakah pada model regresi, variabel residual terdistribusi normal. Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi menyebabkan hasil uji statistik jadi tidak tepat khususnya bagi sampel berukuran kecil. Data normalitas diuji memakai pendekatan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hipotesis dalam K-S dilangsungkan secara membuat hipotesis uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2016:103) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016:110) autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi.

Cara untuk menemukan gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (DW) atau dengan cara Run Test.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Bahri (2018) Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model Regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Model Estimasi

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis panel sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews.

3.6.1 Penentuan Model Estimasi

Teknik analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tiga metode yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect* dan metode *random effect* (Mahulete, 2016).

1. Model Pooled (*Common Effect*)

Model *Common Effect* merupakan model yang sangat sederhana, dikarekan metode yang digunakan dalam model *Common Effect* hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan metode *Ordinal Least Square* (OLS) atau sering disebut teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data

panel. Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahulete, 2016)

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke- i pada waktu ke- i

X_{it}^j : Variabel bebas ke- j individu ke- i pada waktu ke- t

i : Unit *cross-section* sebanyak N

j : Unit *time series* sebanyak T

ε_{it} : Komponen error individu ke- i pada waktu ke- t

α : *Intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke- j (Mahulete, 2016)

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model efek tetap digunakan dalam mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel *dummy*. Model efek tetap berassumsi bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini dapat diakomodasi melalui perbedaan diintersepanya. Oleh karenanya didalam model *fixed effect*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Silalahi, 2014):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke- i pada waktu ke- i

X_{it}^j : Variabel bebas ke- j individu ke- i pada waktu ke- t

D_i : *Dummy* variabel

ε_{it} : Komponen error individu ke- i pada waktu ke- t

α : *Intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke- j (Silalahi, 2014).

Teknik ini umumnya dinamakan dengan istilah *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan dalam efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengkombinasikan efek waktu yang sifatnya sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model. (Silalahi, 2014).

3. Model Efek Acak (*Random Effect*)

Model efek acak sering digunakan dalam perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu individu dan waktu, maka pada model efek acak ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan. Persamaan *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahulete, 2016) :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it} ; \varepsilon_{it} = u_i + Vt + Wit$$

Dimana :

u_i : Komponen *error cross-section*

Vt : Komponen *time series*

Wit : Komponen *error* gabungan. (Silalahi, 2014).

3.6.2 Tahapan Pengujian Model

Untuk pengujian kesesuaian model atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman: (Mahulete, 2016).

1. Uji Chow

Uji Chow adalah uji dalam menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *common effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut: (Mahulete, 2016).

H_0 : Model *Common Effect*

H_a : Model *Fixed Effect*

Statistik chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas $(N-1, NT-N-K)$. Jika nilai chow statistik (F-statistik) $> F$ tabel, maka H_1 diterima, maka yang terpilih adalah model *fixed effect*, atau sebaliknya. (Mahulete, 2016).

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji dalam menentukan uji mana yang paling tepat digunakan diantara kedua metode efek acak (*random effect*) dan metode (*fixed effect*) yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut : (Mahulete, 2016).

H_0 : Metode *Random Effect*

H_a : Metode *Fixed Effect*

3. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) merupakan uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode *Breusch Pagan* dalam uji signifikansi *Random Effect* berdasarkan pada nilai *residual* dari metode OLS.

3.7 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

3.7.1 Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu data dilihat pada hipotesis berikut:

1. Jika nilai prob $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai prob $< 0,05$, maka H_1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

3.7.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan pada umumnya untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pengangguran (X_2) dan kemiskinan (X_3) terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan (Y). Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan program Eviews, Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1. Jika nilai prob F hitung $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai prob F hitung $< 0,05$, maka H_a diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menggambarkan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, yang berarti bahwa variabel bebas memberikan beberapa informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Kelemahan utama penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti umumnya merekomendasikan penggunaan R^2 yang disesuaikan ketika mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Nilai Adjusted R^2 dapat meningkat atau menurun jika salah satu variabel independen ditambahkan ke dalam model penelitian (Ghozali, 2018).

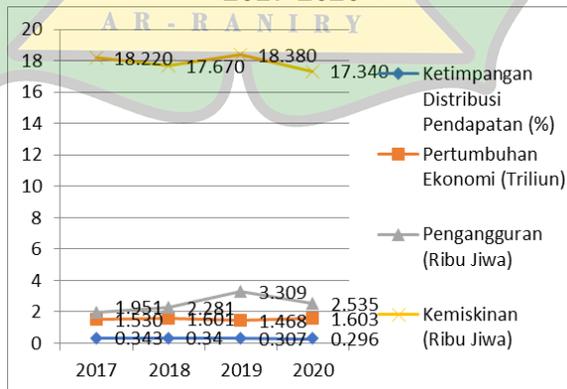
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten simeulue adalah 2.051,48 km². Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Perekonomian Kabupaten Simeulue dominan berasal dariM, peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan minyak bumi. Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2020.

Gambar 4.1
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2020

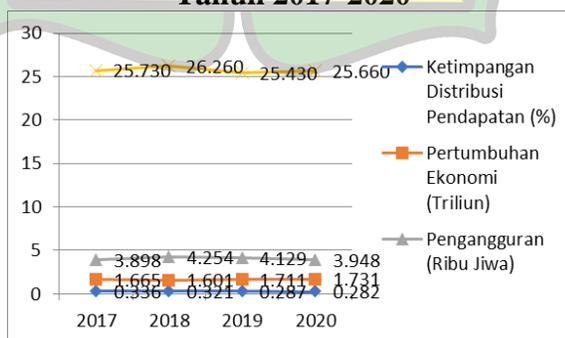


Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Simeulue terus turun dari 0.343 % pada tahun 2017 menjadi 0.296 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif dimana mengalami kenaikan dari 1,530 triliun pada tahun 2017 menjadi 1.603 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran pada 2017 juga cenderung fluktuatif dari 1,951 dimana terdapat peningkatan sebesar 2,535 pengangguran pada tahun 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 18,220 pada 2017 menjadi 17,340 pada 2020.

4.1.2 Kabupaten Aceh Singkil

Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 2185,00 km². Ibukota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017-2020.

Gambar 4.2
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2020

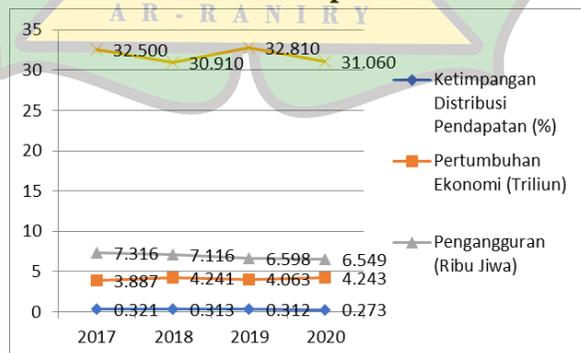


Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Singkil terus turun dari 0.336 % pada tahun 2017 menjadi 0.282 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dimana mengalami kenaikan dari 1,665 triliun pada tahun 2017 menjadi 1.731 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran pada tahun 2017 terdapat pengangguran sebesar 3,898 dan terdapat 3,948 pengangguran pada tahun 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 25,730 pada 2017 menjadi 25,660 pada 2020.

4.1.3 Kabupaten Aceh Selatan

Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 3.841,60. Di bawah ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Selatan tahun 2017-2020.

Gambar 4.3
Grafik Penelitian Kabupaten Aceh Selatan

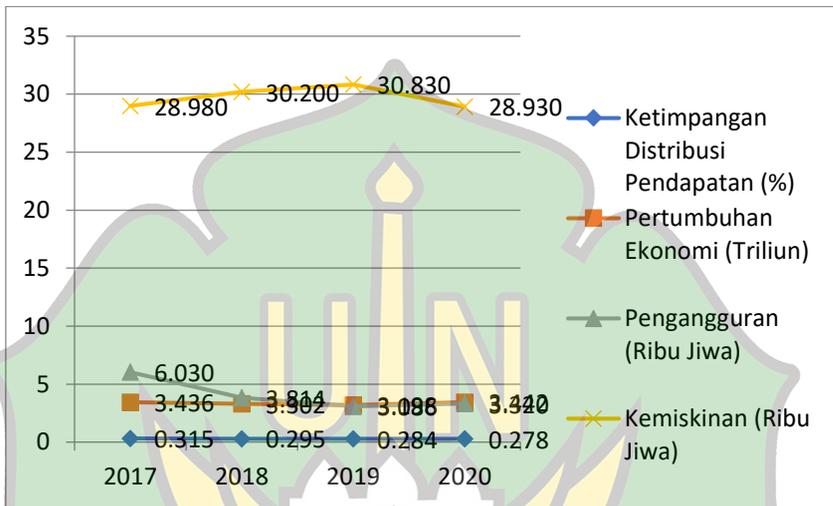


Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Selatan terus turun dari 0.321 % pada tahun 2017 menjadi 0.273 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dimana mengalami kenaikan dari 3,887 triliun pada tahun 2017 menjadi 4.243 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran juga menurun dari 7,316 pada 2017 menjadi 6,549 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 32,500 pada 2017 menjadi 31,060 pada 2020.

4.1.4 Kabupaten Aceh Tenggara

Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 4.231,43 km². Ibukotanya Kutakane, daerah ini terletak di daerah pegunungan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan (Provinsi Aceh dalam angka, 2020). Di bawah ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tenggara pada tahun 2017-2020.

Gambar 4.4
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2020

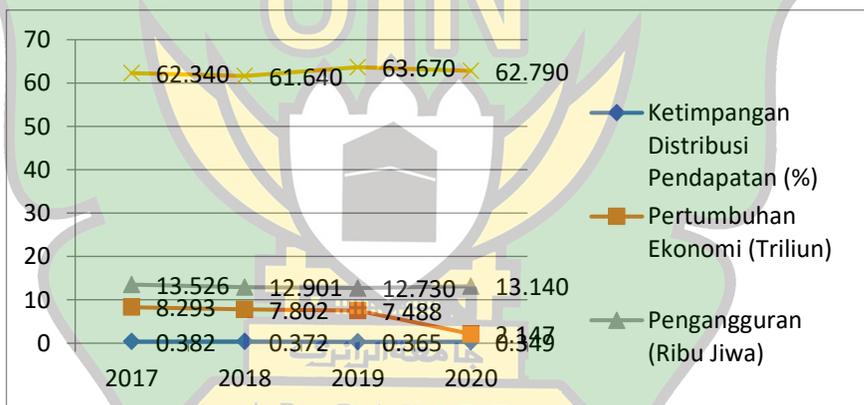


Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Tenggara terus turun dari 0.315 % pada tahun 2017 menjadi 0.278 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dimana dari 3,436 triliun pada tahun 2017 menjadi 3.442 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 6,030 pada 2017 menjadi 3,320 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 28,980 pada 2017 menjadi 28,930 pada 2020.

4.1.5 Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh timur adalah 6.286,01 km². Ibu kotanya adalah Idi Rayeuk (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Timur Tahun 2017-2020.

Gambar 4.5
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2020



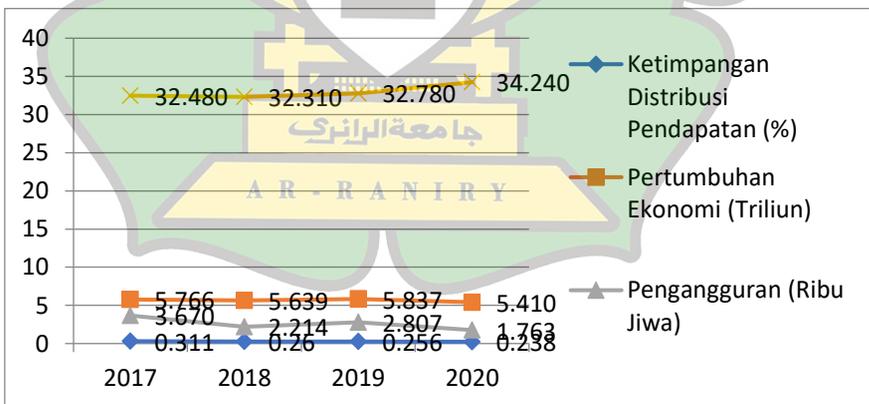
Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Timur terus turun dari 0.382 % pada tahun 2017 menjadi 0.349 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 8.293 triliun pada tahun 2017 menjadi 2.147 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 13,526 pada 2017 menjadi 13,140 pada

2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 62,340 pada 2017 menjadi 62,790 pada 2020.

4.1.6 Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh tengah adalah 4.318,39 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh tengah sebanyak 208.407 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 48 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Tengah Tahun 2017-2020.

Gambar 4.6
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2020



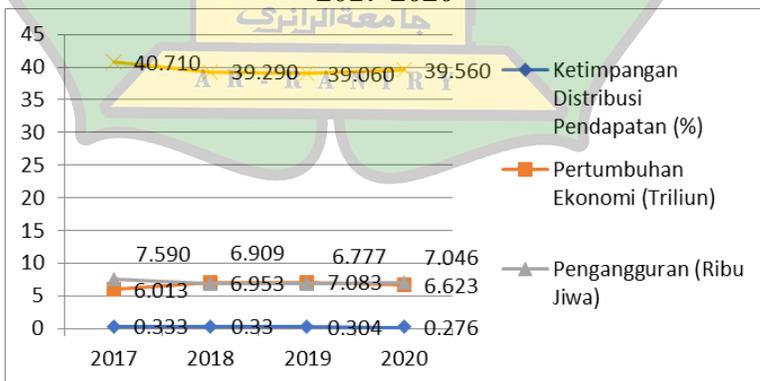
Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Tengah terus turun dari 0.311 % pada tahun 2017 menjadi 0.238 % pada tahun 2020.

Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5.766 triliun pada tahun 2017 menjadi 5.410 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 3,670 pada 2017 menjadi 1,763 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 32,480 pada 2017 menjadi 34,240 pada 2020.

4.1.7 Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh barat adalah 2.927,95 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh barat sebanyak 189.119 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/km², ibu kotanya adalah Meulaboh (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Barat Tahun 2017-2020.

Gambar 4.7
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2020

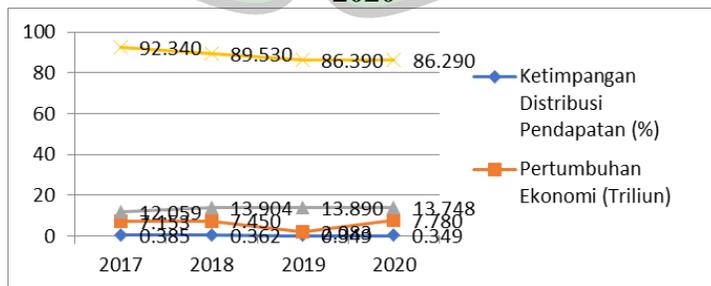


Berdasarkan Gambar 4.7 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Barat terus turun dari 0.333 % pada tahun 2017 menjadi 0.276 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6.013 triliun pada tahun 2017 menjadi 6.623 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 7,590 pada 2017 menjadi 7,046 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan juga mengalami penurunan dari 40,710 pada 2017 menjadi 39,560 pada 2020.

4.1.8 Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh barat adalah 3.086,95 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh barat sebanyak 437.740 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/km². (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Pidie Tahun 2017-2020.

Gambar 4.8
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Pidie Tahun 2017-2020

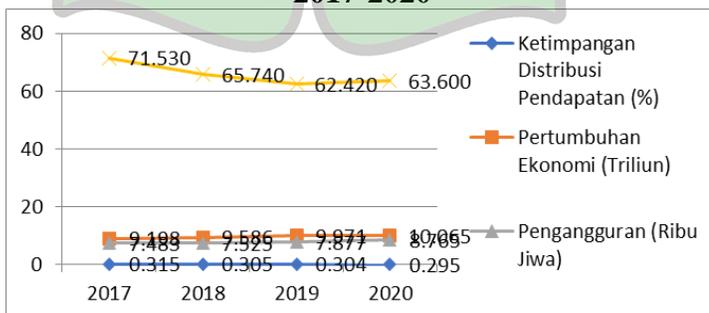


Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Pidie terus turun dari 0.385 % pada tahun 2017 menjadi 0.349 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7.153 triliun pada tahun 2017 menjadi 7.780 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 12,059 pada 2017 menjadi 13,748 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 92,340 pada 2017 menjadi 86,290 pada 2020.

4.1.9 Kabupaten Bireun

Kabupaten Bireun adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Bireun adalah 1.901,20 km², jumlah penduduk pada kabupaten Bireun sebanyak 432.870 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 228 jiwa/km². Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Bireun Tahun 2017-2020.

Gambar 4.9
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Bireun Tahun 2017-2020

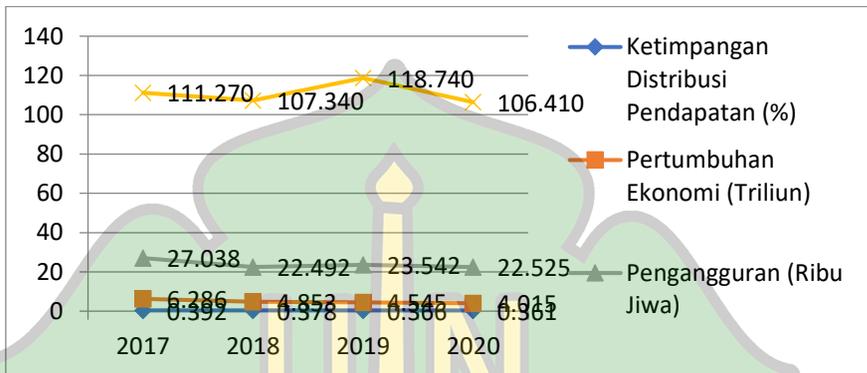


Berdasarkan Gambar 4.9 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Bireun terus turun dari 0.315 % pada tahun 2017 menjadi 0.295 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 9.198 triliun pada tahun 2017 menjadi 10.065 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 7,483 pada 2017 menjadi 8,765 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 71,530 pada 2017 menjadi 63,600 pada 2020.

4.1.10 Kabupaten Aceh Utara

Luas wilayah kabupaten Aceh Utara adalah 3.236,86 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Utara sebanyak 902,554 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 378 jiwa/km². Ibukota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2020.

Gambar 4.10
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2020



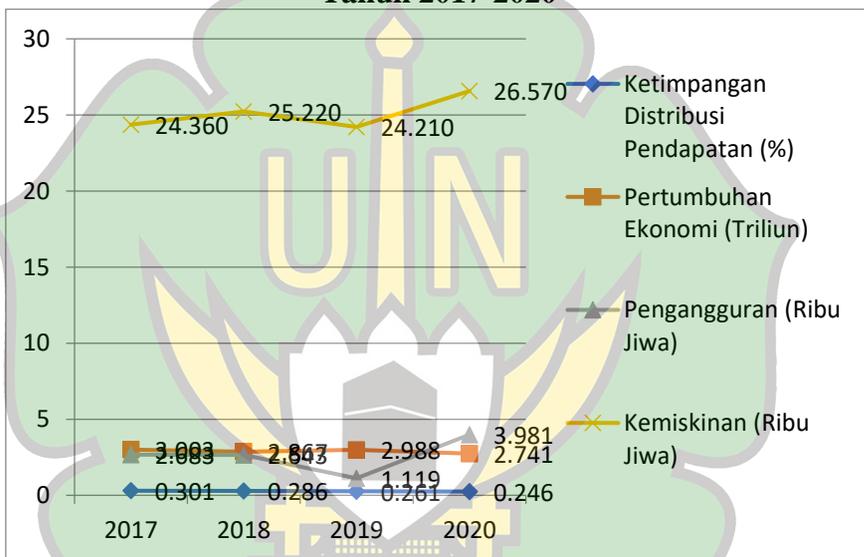
Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Utara terus turun dari 0.392 % pada tahun 2017 menjadi 0.361 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6.286 triliun pada tahun 2017 menjadi 4.015 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 27,038 pada 2017 menjadi 22,525 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 111,270 pada 2017 menjadi 106,410 pada 2020.

4.1.11 Kabupaten Aceh Barat Daya

Indonesia Luas wilayah kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.490,60 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 148.687 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa/km². Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 dengan Ibu Kota

Blangpidie. Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2020.

Gambar 4.11
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2020

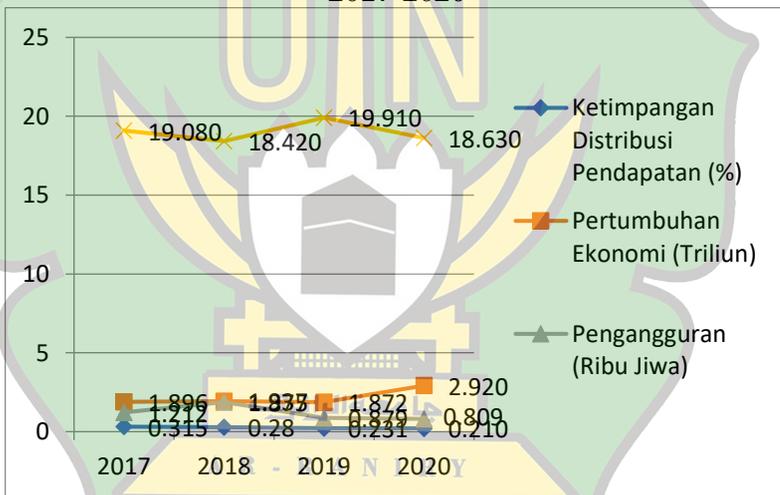


Berdasarkan Gambar 4.11 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya terus turun dari 0.301 % pada tahun 2017 menjadi 0.246 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3.003 triliun pada tahun 2017 menjadi 2.741 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 2,683 pada 2017 menjadi 3,981 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 24,360 pada 2017 menjadi 26,570 pada 2020.

4.1.12 Kabupaten Gayo Lues

Jumlah penduduk pada kabupaten Gayo Lues sebanyak 95.370 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 17 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2020.

Gambar 4.12
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2020



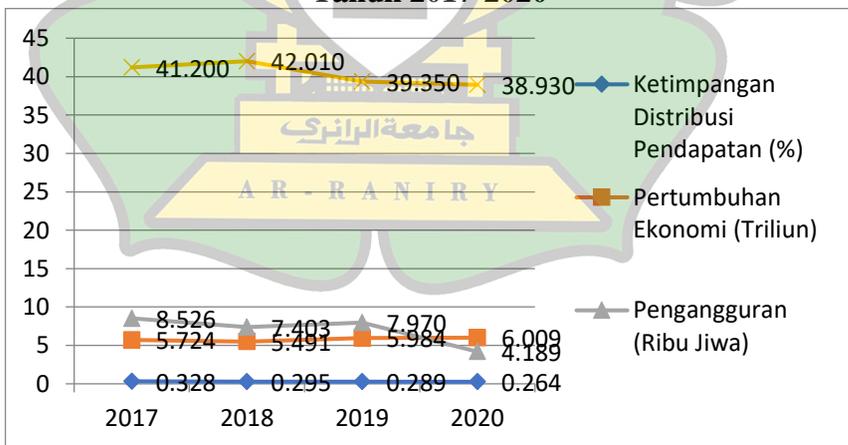
Berdasarkan Gambar 4.12 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Gayo Lues terus turun dari 0.315 % pada tahun 2017 menjadi 0.210 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1.896 triliun pada tahun 2017 menjadi 2.920 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 1,212 pada 2017 menjadi 809

pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan juga mengalami penurunan dari 19,080 pada 2017 menjadi 18,630 pada 2020.

4.1.13 Kabupaten Aceh Tamiang

Luas wilayah kabupaten Aceh Tamiang adalah 1.956,72 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 287.733 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 147 jiwa/km². Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh Sumatra Utara (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2020.

Gambar 4.13
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2020



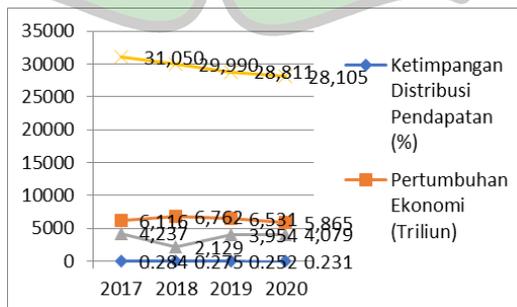
Berdasarkan Gambar 4.13 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Tamiang terus turun dari

0.328 % pada tahun 2017 menjadi 0.264 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5.724 triliun pada tahun 2017 menjadi 6.009 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 8,526 pada 2017 menjadi 4,189 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan juga mengalami penurunan dari 41,200 pada 2017 menjadi 38,930 pada 2020.

4.1.14 Kabupaten Nagan Raya

Luas wilayah kabupaten Nagan Raya adalah 3.363,72 km², jumlah penduduk pada kabupaten Nagan Raya sebanyak 167.672 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 50 jiwa/km². Ibu kotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.

Gambar 4.14
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

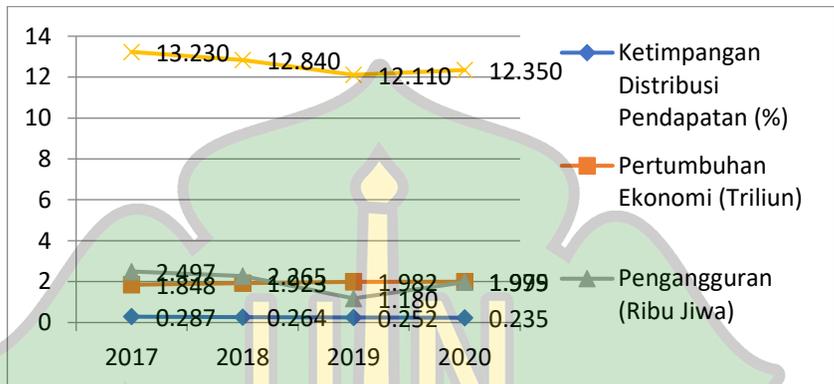


Berdasarkan Gambar 4.14 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Nagan Raya terus turun dari 0.284 % pada tahun 2017 menjadi 0.231 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6.116 triliun pada tahun 2017 menjadi 5.865 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 4,237 pada 2017 menjadi 4,079 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 31,050 pada 2017 menjadi 28,105 pada 2020.

4.1.15 Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Jaya adalah 3.812,99 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Jaya sebanyak 86.058 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 20 jiwa/km². Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2020.

Gambar 4.15
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2020



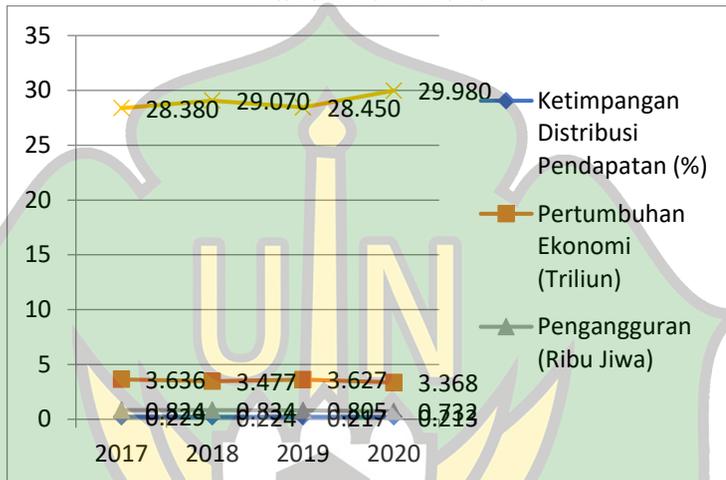
Berdasarkan Gambar 4.15 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Jaya terus turun dari 0.287 % pada tahun 2017 menjadi 0.235 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1.848 triliun pada tahun 2017 menjadi 1.995 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 2,497 pada 2017 menjadi 1,979 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,230 pada 2017 menjadi 12,350 pada 2020.

4.1.16 Kabupaten Bener Meriah

Jumlah penduduk pada kabupaten Bener Meriah sebanyak 154.509 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 106 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan

distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2020.

Gambar 4.16
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2017-2020

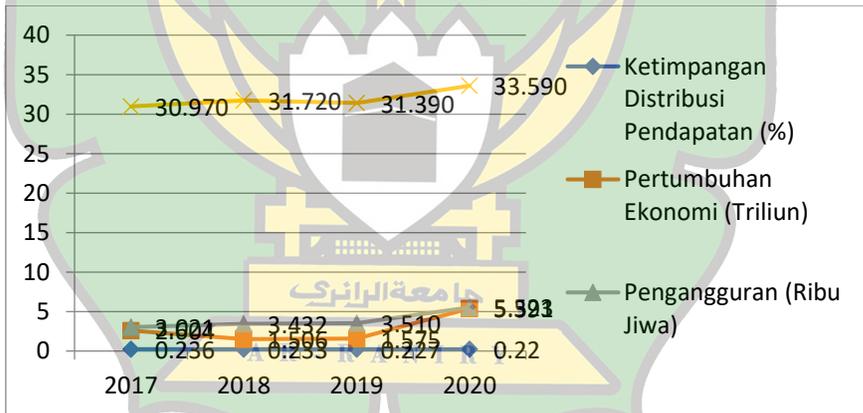


Berdasarkan Gambar 4.16 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Bener Meriah terus turun dari 0.229 % pada tahun 2017 menjadi 0.213 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3.636 triliun pada tahun 2017 menjadi 3.368 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 824 pada 2017 menjadi 732 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 28,380 pada 2017 menjadi 29,980 pada 2020.

4.1.17 Kabupaten Pidie Jaya

Luas wilayah Pidye Jaya 1.073,60 km², jumlah penduduk Pidye Jaya 157.588 dengan kepadatan penduduk 142 jiwa/km². Ibukotanya adalah Mereudu. Kabupaten ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Pidye (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pidye Jaya Tahun 2017-2020.

Gambar 4.17
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017-2020



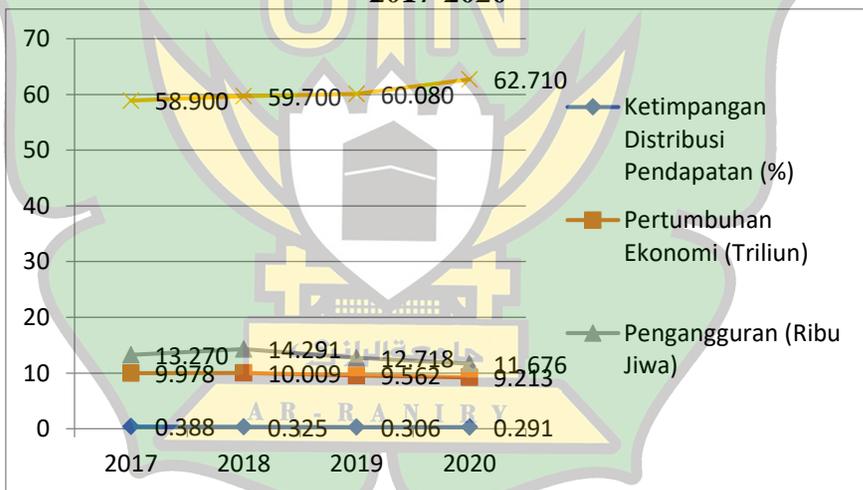
Berdasarkan Gambar 4.17 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Pidie Jaya terus turun dari 0.236 % pada tahun 2017 menjadi 0.220 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 2.604 triliun pada tahun 2017 menjadi 5.391 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 3,021 pada 2017 menjadi

5,523 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 30,970 pada 2017 menjadi 33,590 pada 2020.

4.1.18 Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2020.

Gambar 4.18
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2020



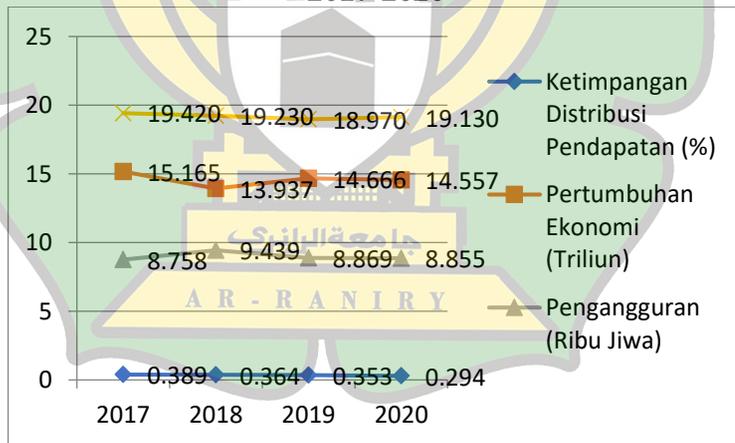
Berdasarkan Gambar 4.18 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Aceh Besar terus turun dari 0.388 % pada tahun 2017 menjadi 0.291 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 9.978 triliun pada tahun 2017 menjadi 9.213 triliun pada tahun 2020. Untuk

pengangguran menurun dari 13,270 pada 2017 menjadi 11,676 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 58,900 pada 2017 menjadi 62,710 pada 2020.

4.1.19 Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk pada kabupaten Kota Banda Aceh sebanyak 238.814 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.892 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020.

Gambar 4.19
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020



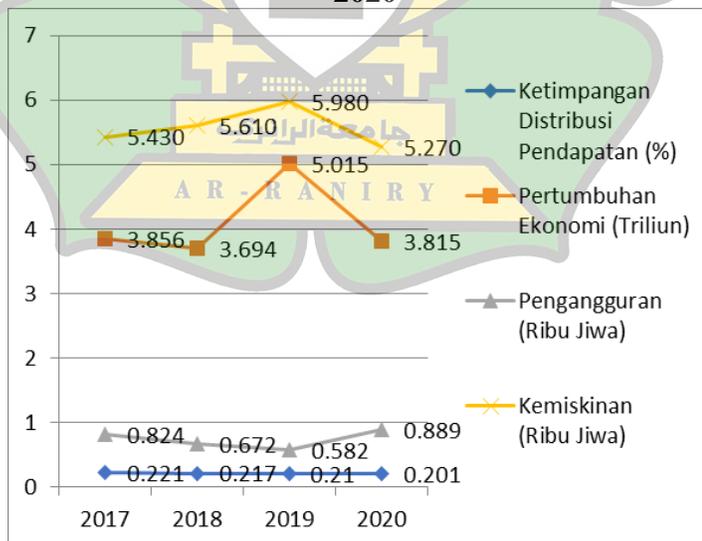
Berdasarkan Gambar 4.19 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kota Banda Aceh terus turun dari 0.389 % pada tahun 2017 menjadi 0.294 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 15.165 triliun pada tahun 2017 menjadi 14.557 triliun pada tahun 2020. Untuk

pengangguran meningkat dari 8,758 pada 2017 menjadi 8,855 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 19,420 pada 2017 menjadi 19,130 pada 2020.

4.1.20 Kota Sabang

Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Sabang adalah 153,00 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Sabang sebanyak 40.040 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 262 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kota Sabang Tahun 2017-2020.

Gambar 4.20
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kota Sabang Tahun 2017-2020

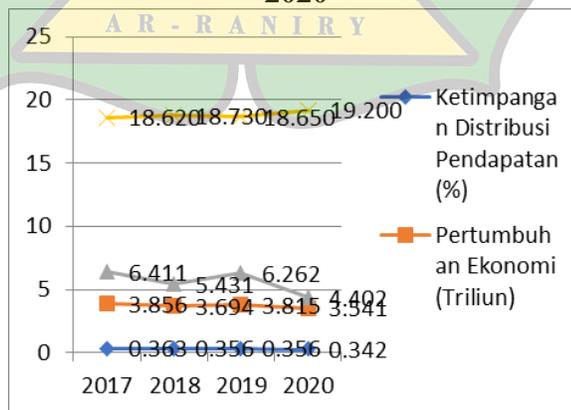


Berdasarkan Gambar 4.20 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kota Sabang terus turun dari 0.221 % pada tahun 2017 menjadi 0.201 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3.856 triliun pada tahun 2017 menjadi 3.815 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 824 pada 2017 menjadi 889 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami penurunan dari 5,430 pada 2017 menjadi 5,270 pada 2020.

4.1.21 Kota Langsa

Jumlah penduduk pada kabupaten Kota Langsa sebanyak 182.424 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 695 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kota Langsa Tahun 2017-2020.

Gambar 4.21
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2017-2020

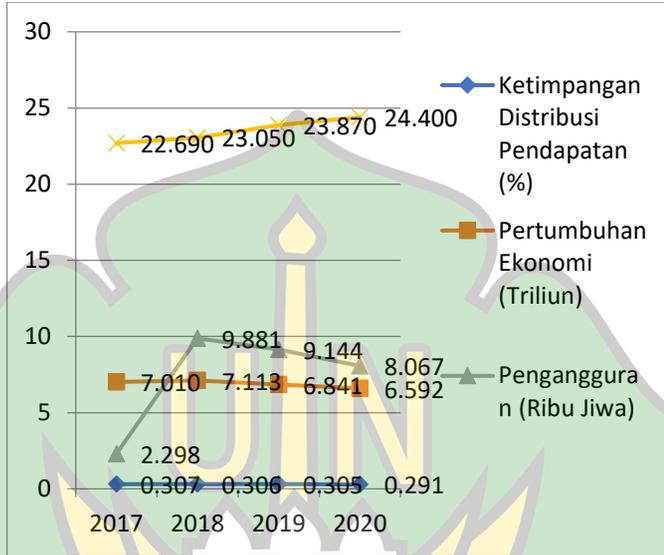


Berdasarkan Gambar 4.21 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kota Langsa terus turun dari 0.363 % pada tahun 2017 menjadi 0.342 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3.856 triliun pada tahun 2017 menjadi 3.541 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 6,411 pada 2017 menjadi 4,402 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 18,620 pada 2017 menjadi 19,200 pada 2020.

4.1.22 Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Lhokseumawe adalah 181,06 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Lhokseumawe sebanyak 190.624 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.502 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2020). Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020.

Gambar 4.22
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020



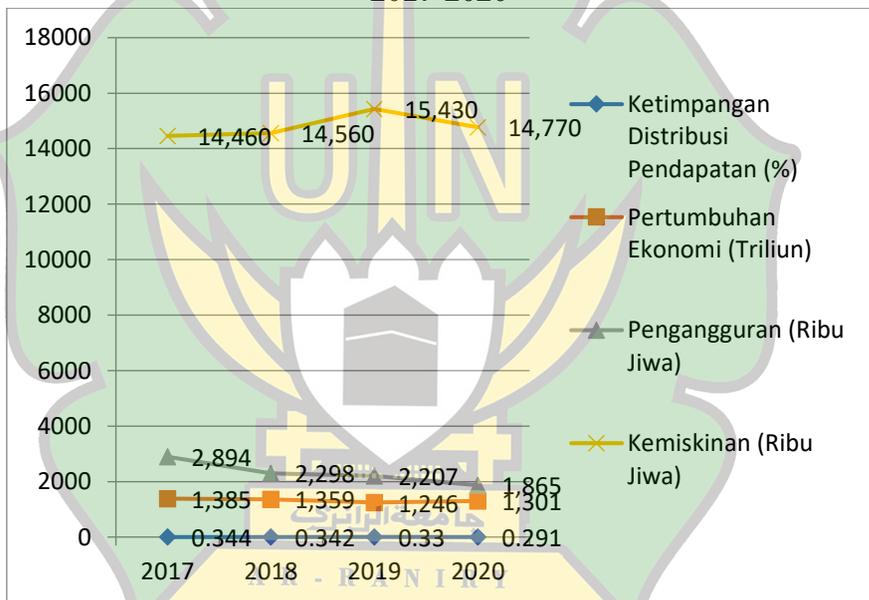
Berdasarkan Gambar 4.22 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kota Langsa terus turun dari 0.307 % pada tahun 2017 menjadi 0.291 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 7.010 triliun pada tahun 2017 menjadi 6.592 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran meningkat dari 2,298 pada 2017 menjadi 8,067 pada 2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 22,690 pada 2017 menjadi 24,400 pada 2020.

4.1.23 Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Subulussalam adalah 1.391,00 km²,

jumlah penduduk pada kabupaten Kota Subulussalam sebanyak 81.187 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 58 jiwa/km². Berikut adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2017-2020.

Gambar 4.23
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2017-2020



Berdasarkan Gambar 4.23 diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kota Subulussalam terus turun dari 0.344 % pada tahun 2017 menjadi 0.291 % pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 1.385 triliun pada tahun 2017 menjadi 1.301 triliun pada tahun 2020. Untuk pengangguran menurun dari 2,894 pada 2017 menjadi 1,865 pada

2020. Sedangkan untuk kemiskinan mengalami peningkatan dari 14,460 pada 2017 menjadi 14,770 pada 2020.

4.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.1 menunjukkan nilai stasistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif (N=69)

Indikator	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pertumbuhan Ekonomi	Penganggura	Kemiskinan
Mean	0.299098	5104.577	6232.043	3637.207
Median	0.302500	3951.335	4159.000	2995.500
Maximum	0.392000	16286.46	27038.00	11874.00
Minimum	0.201000	1246.120	582.0000	527.0000
Std. Dev.	0.050129	3442.335	5464.097	2508.627

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Variabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan memiliki nilai maksimum sebesar 0,392 % yaitu pada Kabupaten Aceh Utara tahun 2017, nilai minimum sebesar 0,201 % yaitu pada Kota Sabang tahun 2020, rata-rata sebesar 0,299 % dengan standar deviasi sebesar 0,050. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki

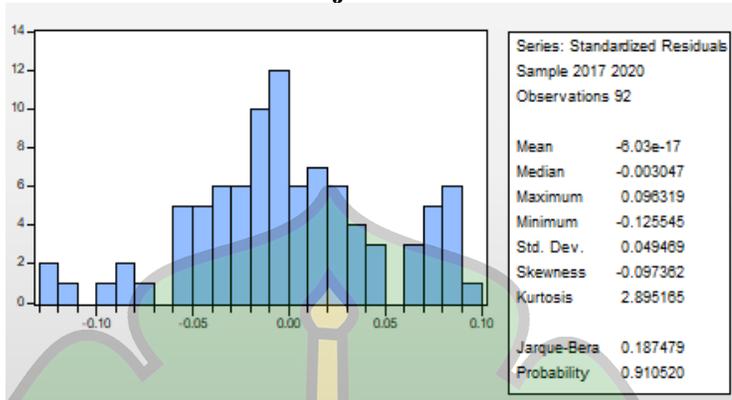
nilai maksimum sebesar 16,286 yaitu pada Kota Banda Aceh tahun 2017, nilai minimum sebesar 1,246 yaitu pada Kota Subulussalam tahun 2019, rata-rata sebesar 5,104 dengan standar deviasi sebesar 3,442. Variabel Pengangguran memiliki nilai maksimum sebesar 27,038 yaitu pada Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 , nilai minimum sebesar 582 yaitu pada Kota Sabang tahun 2019, rata-rata sebesar 6,232 dengan standar deviasi sebesar 5465. Variabel Kemiskinan memiliki nilai maksimum 11,874 yaitu pada Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, nilai minimum sebesar 527 yaitu pada Kota Sabang tahun 2020, rata-rata sebesar 3,637 dengan standar deviasi sebesar 2508.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya data yang akan dianalisis. Pengujian normalitas dalam pengujian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*. Hasil uji *Jarque-Bera* pada 69 populasi pengamatan dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24
Hasil Uji Normalitas



Pada Gambar 4.24 menunjukkan pengujian normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,910, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Berikut adalah nilai *tolerance* dan VIF pada pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pertumbuhan Ekonomi	.718	1.393
Pengangguran	.673	1.486
Kemiskinan	.926	1.080

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas karena nilai VIF < 10 dan tolerance > 0.10.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Berikut hasil dari uji *Durbin Watson* untuk pengujian hasil autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Du	Dw	4-Du	Keterangan
1,7343	2,156	2,165	Terdapat autokorelasi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 2,156. Nilai DW kurang dari Du sebesar. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	52.87209	23	0.0004

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai probability sebesar $0,0004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada data penelitian.

4.4 Estimasi Regresi Data Panel

4.4.1 Hasil Uji Chow

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model, maka digunakan uji F Restricted dengan membandingkan nilai cross-section F. Hasil uji chow dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.718727	(22,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.140701	22	0.0000

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Dari hasil Chow test pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 6,718 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section F $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terima H1 tolak H0. Sehingga model yang digunakan adalah model Fixed Effect Model (FEM).

4.4.2 Uji Hausmann

Hausman test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Maka digunakan uji dengan nilai cross-section random. Hasil uji hausman dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	10.742910	3	0.0132	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.
X1	0.052017	0.009161	0.000409	0.0341
X2	0.042956	0.069791	0.000219	0.0701
X3	0.078768	0.073542	0.000143	0.6626

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Dari hasil Hausman test pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section sebesar 0,0132 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0132 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terima H_1 tolak H_0 . Sehingga model yang digunakan adalah model Fixed Effect Model (FEM).

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausmann, diperoleh bahwa model terbaik adalah model FEM. Dengan demikian uji lagrange multiplier tidak perlu dilakukan dan pengujian akan menggunakan model FEM.

4.5 Hasil Uji Goodness of Fit

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Fixed Effect Model pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.146397	0.164761	-6.957949	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	0.052017	0.030816	1.688018	0.0961
Pengangguran	0.042956	0.024042	2.786736	0.0386
Kemiskinan	0.078768	0.021769	3.618376	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866564	Mean dependent var	-0.530480
F-statistic	17.14482	Durbin-Watson stat	2.156497
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, bentuk persamaan dengan regresi Fixed effect model adalah: $Y = -1.146 + 0.052X_1 + 0.042X_2 + 0.078X_3$.

4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Hasil pengujian signifikansi regresi untuk hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,096 > 0,05$ maka H_a ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amri (2017) dimana menemukan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, hasil pengujian pengaruh pengangguran menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ maka H_a diterima, artinya pengangguran berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindun dkk (2019) dimana menemukan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Terakhir, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima maka H_a diterima, artinya Kemiskinan berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindun

dkk (2019) dimana menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh F hitung sebesar 17.144 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam penelitian menjelaskan proporsi variasi variabel terikatnya. Nilai R square sebesar 0,8665 atau 86,65% dimana menunjukkan bahwa besar pengaruh secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah sebesar 86,65%, sedangkan sisanya 13,35% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020. Besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan sebesar 0,8665 dimana menunjukkan bahwa besar pengaruh secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah sebesar 86,65%.
2. Hasil uji signifikansi (Uji T) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,096 > 0,05$, artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil ini dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi dalam jangka panjang sehingga tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah
3. Hasil uji signifikansi (Uji T) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, artinya Pengangguran berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2017-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengangguran maka akan meningkatkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat mempengaruhi menurunkan upah golongan berpendapatan kebawah (rendah) sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan bahwa lowongan kerja harus disediakan dan harus diciptakan sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja, supaya pembagian pendapatan menjadi merata.

4. Hasil uji signifikansi (Uji T) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2017-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kemiskinan maka akan meningkatkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Kemiskinan dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan diantara kaya dan miskin semakin timpang. Tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara berkembang semakin meningkat pula. Oleh karna itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, supaya ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Adapun beberapa penelitian terkait korelasi

pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut.

5.2 Saran

1. Pemerintah provinsi kabupaten/kota di provinsi Aceh terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan agar ketimpangan distribusi pendapatan dapat lebih baik lagi.
2. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh harus lebih meningkatkan sumber pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah agar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan daerah.
3. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh harus lebih memperhatikan sumber lapangan kerja. Peningkatan sumber lapangan kerja akan dapat menurunkan pengangguran. Dengan demikian dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan daerah.
4. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh juga harus lebih serius dalam memberantas kemiskinan. Pemerintah harus dapat membuat pemerataan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan daerah.

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat memakai variabel lain dalam melakukan penelitian yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khaeruzzad. (2019). *Analisis Factor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Uin Sunan Kalijaga; Yogyakarta
- Alin, N. F, Heriberta. (2019). Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets Mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 14. No. 1, ISSN: 2085-1960.
- Al-Qur'an Surat Ar-Ruum. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Arif, M. Wicaksani, R. S. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal URECOL*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 1, No. 1, hlm 17-28.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asytuti (2016). Urgensi Modal Sosial dalam Liberalisasi Perekonomian bagi Usaha Kecil Menengah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 12, No. 2.
- Badrudin. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ekonomidan Manajemen Teknologi*, Vol. 1, No. 1, hlm 1-11.
- Bahri. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Bintarto. (2019). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- BPS Aceh. (2016). Provinsi Aceh Besar dalam Angka 2016.
- BPS Aceh. (2017). Provinsi Aceh Besar dalam Angka 2017.
- BPS Aceh. (2019). Provinsi Aceh Besar dalam Angka 2019.
- BPS Aceh. (2020). Provinsi Aceh Besar dalam Angka 2020.
- Budiono Sudjatmiko dan Yando Zakaria. (2017). *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustika.
- Case & Fair. (2017). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, M. U. (2020). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Danil, Mahyu. (2016). Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV, No.7.
- Dartanto, T., & Putra, N. E. (2018). *Ketimpangan Kesempatan Jadi Penyebab Ketimpangan Pendapatan*. Retrieved January 28, from www.feb.ui.ac.id
- Dea Fauzia. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Sulawesi*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efriza, dan Yoyoh Rohaniah, (2017). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intans Publishing

- Erna Siara. 2021. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesen. *Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 7.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gustiara, Y & Syahri, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatra Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, Vol. 1, No. 1 Media Online. (Website <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>)
- Hassan. 2017. *Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia (Perekonomian Indonesia)*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Hidayat, M. S. dan E. S. (2019). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kota Mojokerto. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIPMA*, Vol. 1, No. 1, hlm. 487-489.
- Hindun, Soejoto, A, Hariati (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 27, No. 1, hlm. 37-52.
- Huda (2016). Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Metodis dan Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Huda, N dan Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam Tinauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Idri. (2015). Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *Jurnal Hadis Ekonomi*. Vol. 4, No. 3.
- Isdjoyo. (2020). *Kemiskinan di Perkotaan Masukan Untuk Rencana Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional*. Jakarta.
- Istikharoh, Prijanto, Destiningsih (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -2018. Universitas Tidar. *Directory Journal of Economic*, Vol. 2, No. 1
- Istriana, E. I. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Itang. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 16, No. 01, hlm 3-30.
- Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 01, hlm 818–830.
- Khairul Amri. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatra. *Jurnal EMT KITA*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-11.

- Kristanto, P. D. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012. Skripsi.
- Kuncoro, Mudrajad. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, R., Huda, S. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi Pendapatan provinsi bali. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 3 No. 2.
- Ma'mun. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2018, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahulete, Ummi. K. (2016). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marashdeh. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2016, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Meliza & Murtala (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 3, No. 01.
- Mencher. (2020). *Ekonomika Pembangunan, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE.
- Mohamad Syamsul Hidayat. (2018). *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Muhammad. (2018). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Murty, S. (2020). *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development In Regional Planning and Sustainable Development*. New Delhi: Kanishka Publishers.
- Mustika. C. (2018). Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 1, No.4, hlm.15.
- Nazipawati. (2019). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pola Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Belajasumba TAHUN 2013-2017. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah.
- Nugaraheni & Kristanto. (2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurlina, Candra. (2017). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pangkiro, Rotinsulu, Wauran. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 1.
- Permana. R. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18, No, 2.

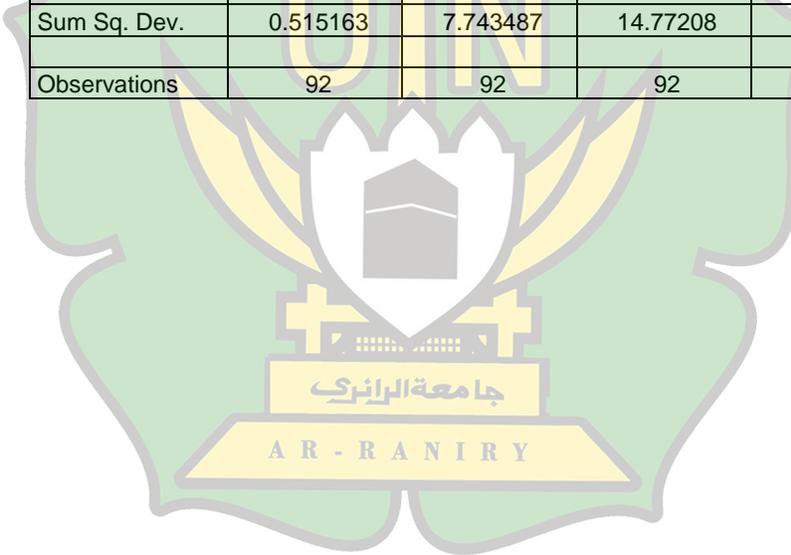
- Pi & Zhang. (2018). *Pokok-Pokok Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Rahayu, S. H.M. Mozart, B. D. & Hasman H. (2017). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan pengangguran petani padi (Studi Kasus: desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). *Journal Fakultas Pertanian*. USU. Medan.
- Rahayu, Sri, HM Mozart B. Darius, and Hasman Hasyim. (2017). Analisis tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan petani padi (Studi Kasus: Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, Vol. 2, No. 10.
- Ramdani, M (2015). Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis*. EDAJ 4 (1)
- Sari, W. A. (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kecil Menengah Dapur Aura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Tegal Seruni Desa Samiran Selo Boyolali. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Silalahi, U. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sjafrizal. (2017). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Srihardianti, M, Mustafid. (2016). Metode Regresi Data Panel untuk Peramala Konsumsi Energi di Indonesia. *Jurnal Gaussian*, Vol. 5, No. 3.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suryaningsih, I. 2021. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Suryawati, C. (2017). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
- Swasono. (2020). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Syawie. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005 – 2015, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Todaro. M. P dan Smith. S. C, (2016), *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Sebelas. Jakarta: Erlangga.
- Wilson. (2017). *Perekonomian Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lampiran 1

STATISTIK DESKRIPTIF DATA LOG

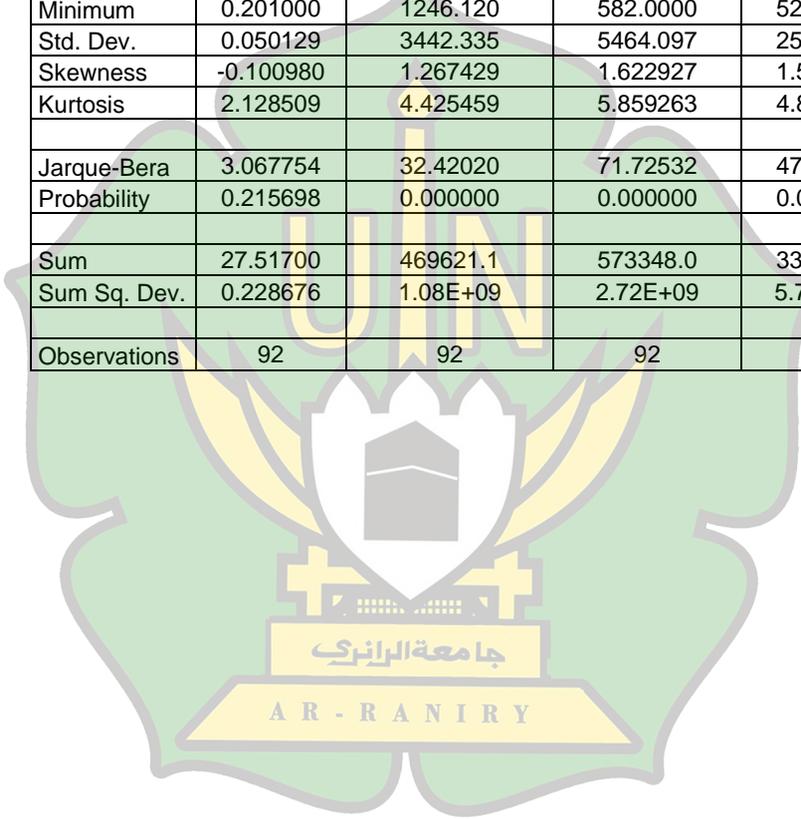
	Y	X1	X2	X3
Mean	-0.530480	3.614039	3.629361	3.453441
Median	-0.519280	3.596687	3.618978	3.469776
Maximum	-0.406714	4.211827	4.431975	4.288249
Minimum	-0.696804	3.095560	2.764923	2.526210
Std. Dev.	0.075240	0.291707	0.402903	0.345602
Skewness	-0.385761	-0.002085	-0.252450	-0.239902
Kurtosis	2.246664	2.076566	2.364092	3.340660
Jarque-Bera	4.457247	3.268868	2.527326	1.327333
Probability	0.107677	0.195063	0.282617	0.514960
Sum	-48.80414	332.4916	333.9013	317.7165
Sum Sq. Dev.	0.515163	7.743487	14.77208	10.86909
Observations	92	92	92	92



Lampiran 2

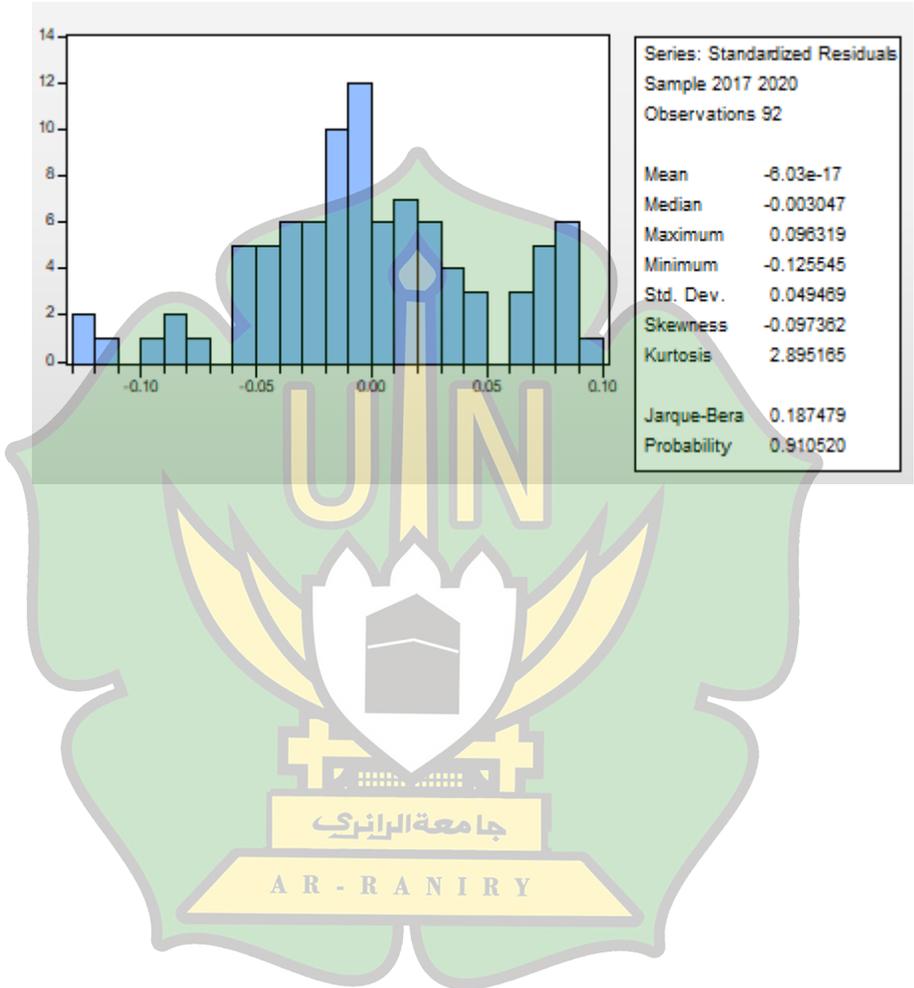
STATISTIK DESKRIPTIF DATA ASLI

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.299098	5104.577	6232.043	3637.207
Median	0.302500	3951.335	4159.000	2995.500
Maximum	0.392000	16286.46	27038.00	11874.00
Minimum	0.201000	1246.120	582.0000	527.0000
Std. Dev.	0.050129	3442.335	5464.097	2508.627
Skewness	-0.100980	1.267429	1.622927	1.516964
Kurtosis	2.128509	4.425459	5.859263	4.805140
Jarque-Bera	3.067754	32.42020	71.72532	47.77578
Probability	0.215698	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	27.51700	469621.1	573348.0	334623.0
Sum Sq. Dev.	0.228676	1.08E+09	2.72E+09	5.73E+08
Observations	92	92	92	92



Lampiran 3

UJI NORMALITAS



Lampiran 4

UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/04/21 Time: 17:38

Sample: 2017 2020

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.146397	0.164761	-6.957949	0.0000
X1	0.052017	0.030816	1.688018	0.0961
X2	0.042956	0.024042	2.786736	0.0286
X3	0.078768	0.021769	3.618376	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866564	Mean dependent var	-0.530480
Adjusted R-squared	0.816021	S.D. dependent var	0.075240
S.E. of regression	0.032273	Akaike info criterion	-3.796102
Sum squared resid	0.068741	Schwarz criterion	-3.083423
Log likelihood	200.6207	Hannan-Quinn criter.	-3.508459
F-statistic	17.14482	Durbin-Watson stat	2.156497
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5

UJI HETEROKEDASTISITAS

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

Equation: UNTITLED

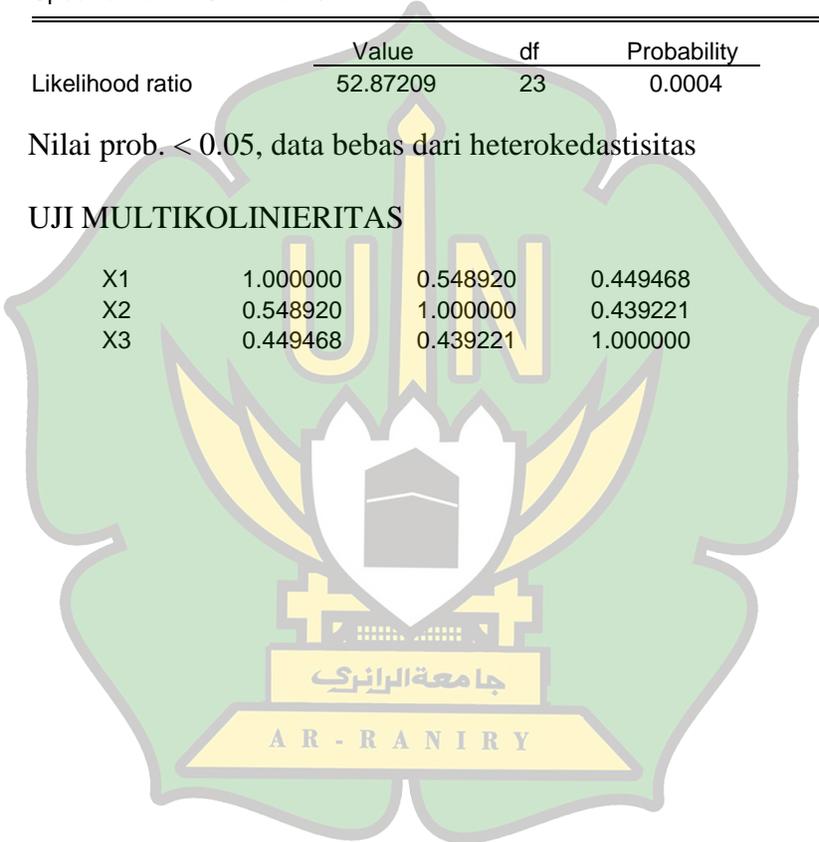
Specification: Y C X1 X2 X3

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	52.87209	23	0.0004

Nilai prob. < 0.05, data bebas dari heterokedastisitas

UJI MULTIKOLINIERITAS

X1	1.000000	0.548920	0.449468
X2	0.548920	1.000000	0.439221
X3	0.449468	0.439221	1.000000

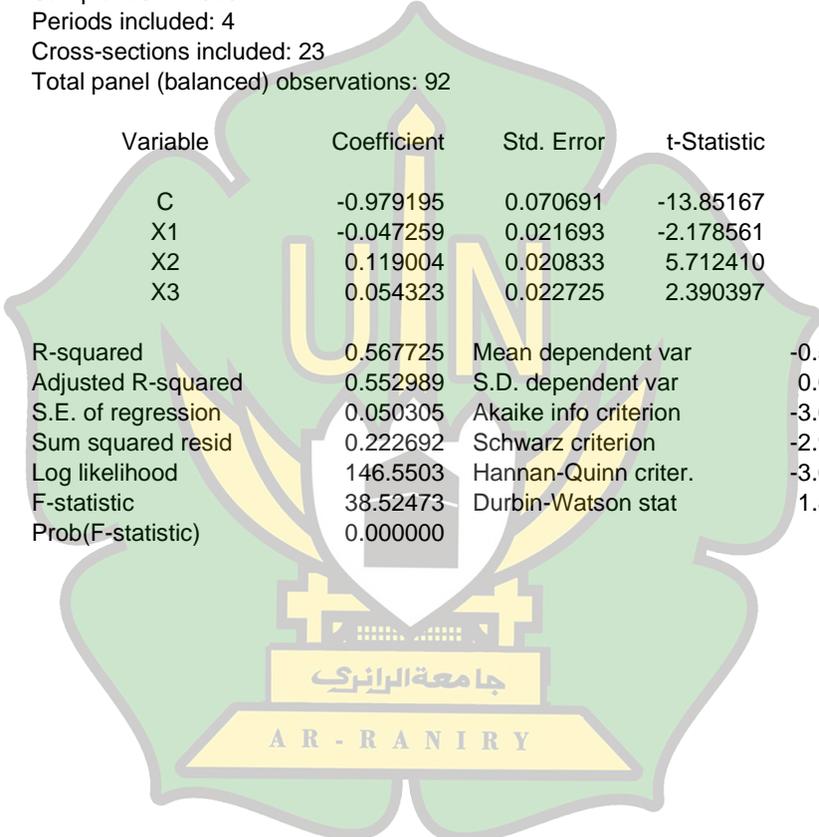


Lampiran 6

COMMON EFFECT

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/04/21 Time: 17:26
Sample: 2017 2020
Periods included: 4
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.979195	0.070691	-13.85167	0.0000
X1	-0.047259	0.021693	-2.178561	0.0320
X2	0.119004	0.020833	5.712410	0.0000
X3	0.054323	0.022725	2.390397	0.0190
R-squared	0.567725	Mean dependent var		-0.530480
Adjusted R-squared	0.552989	S.D. dependent var		0.075240
S.E. of regression	0.050305	Akaike info criterion		-3.098921
Sum squared resid	0.222692	Schwarz criterion		-2.989278
Log likelihood	146.5503	Hannan-Quinn criter.		-3.054668
F-statistic	38.52473	Durbin-Watson stat		1.829674
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 7

FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/04/21 Time: 17:38
 Sample: 2017 2020
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.146397	0.164761	-6.957949	0.0000
X1	0.052017	0.030816	1.688018	0.0961
X2	0.042956	0.024042	2.786736	0.0386
X3	0.078768	0.021769	3.618376	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866564	Mean dependent var	-0.530480
Adjusted R-squared	0.816021	S.D. dependent var	0.075240
S.E. of regression	0.032273	Akaike info criterion	-3.796102
Sum squared resid	0.068741	Schwarz criterion	-3.083423
Log likelihood	200.6207	Hannan-Quinn criter.	-3.508459
F-statistic	17.14482	Durbin-Watson stat	2.156497
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 8

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/04/21 Time: 17:38
 Sample: 2017 2020
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 92
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.070860	0.093872	-11.40767	0.0000
X1	0.009161	0.023251	0.393999	0.6945
X2	0.069791	0.018935	3.685760	0.0004
X3	0.073542	0.018179	4.045461	0.0001
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.036839	0.5658
Idiosyncratic random			0.032273	0.4342
Weighted Statistics				
R-squared	0.360629	Mean dependent var		-0.212839
Adjusted R-squared	0.338832	S.D. dependent var		0.041399
S.E. of regression	0.033663	Sum squared resid		0.099719
F-statistic	16.54510	Durbin-Watson stat		1.988341
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.522958	Mean dependent var		-0.530480
Sum squared resid	0.245755	Durbin-Watson stat		1.806805

Lampiran 9

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.718727	(22,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.140701	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/04/21 Time: 17:41

Sample: 2017 2020

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.979195	0.070691	-13.85167	0.0000
X1	-0.047259	0.021693	-2.178561	0.0320
X2	0.119004	0.020833	5.712410	0.0000
X3	0.054323	0.022725	2.390397	0.0190

R-squared	0.567725	Mean dependent var	-0.530480
Adjusted R-squared	0.552989	S.D. dependent var	0.075240
S.E. of regression	0.050305	Akaike info criterion	-3.098921
Sum squared resid	0.222692	Schwarz criterion	-2.989278
Log likelihood	146.5503	Hannan-Quinn criter.	-3.054668
F-statistic	38.52473	Durbin-Watson stat	1.829674
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10

UJI HAUSMANN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.742910	3	0.0132

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.052017	0.009161	0.000409	0.0341
X2	0.042956	0.069791	0.000219	0.0701
X3	0.078768	0.073542	0.000143	0.6626

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/04/21 Time: 17:42
Sample: 2017 2020
Periods included: 4
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 92

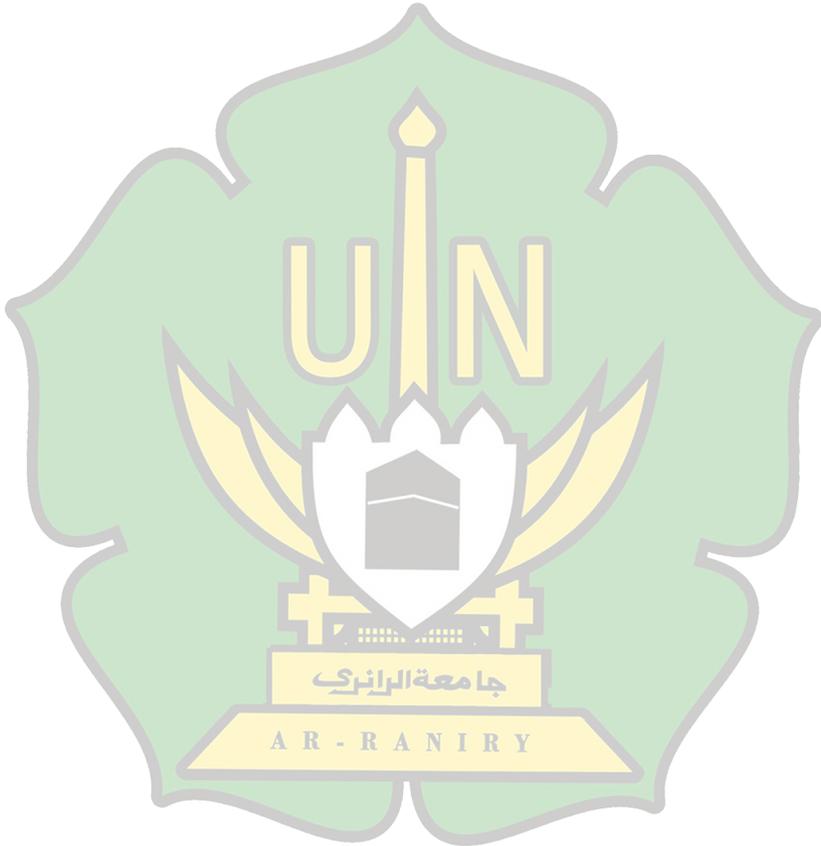
Variable	AR Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.146397	0.164761	-6.957949	0.0000
X1	0.052017	0.030816	1.688018	0.0961
X2	0.042956	0.024042	1.786736	0.0786
X3	0.078768	0.021769	3.618376	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866564	Mean dependent var	-0.530480
Adjusted R-squared	0.816021	S.D. dependent var	0.075240
S.E. of regression	0.032273	Akaike info criterion	-3.796102

Sum squared resid	0.068741	Schwarz criterion	-3.083423
Log likelihood	200.6207	Hannan-Quinn criter.	-3.508459
F-statistic	17.14482	Durbin-Watson stat	2.856497
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 11

UJI LAGRANGE MULTIPLIER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	21.26581 (0.0000)	20.89745 (0.0000)	51.21564 (0.0000)
Honda	5.103600 (0.0000)	5.283006 (0.0000)	7.344439 (0.0000)
King-Wu	5.103600 (0.0000)	5.283006 (0.0000)	6.723837 (0.0000)
Standardized Honda	5.651461 (0.0000)	6.397644 (0.0000)	4.601032 (0.0000)
Standardized King-Wu	5.651461 (0.0000)	6.397644 (0.0000)	5.177117 (0.0000)
Gourierioux, et al.*		--	53.95688 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values: γ	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	